

BAB III

PETA KEKUATAN KEPENTINGAN DAN SIKAP YANG DIAMBIL

DALAM PENUTUPAN LOKALISASI DOLLY-JARAK DI KOTA

SURABAYA

Di bab tiga ini peneliti akan menyajikan dan membahas temuan data di lapangan yang telah diperoleh. Hasil temuan ini mengenai peta kekuatan kepentingan yang ada saat penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak serta bagaimana perempuan PSK dan Pemerintah Kota Surabaya menyikapinya. Kekuatan kepentingan dari berbagai pihak bisa jadi muncul mengingat lokalisasi Dolly-Jarak merupakan lokalisasi yang terbesar di Surabaya dan di Jawa Timur. Ada pihak yang setuju dan tidak setuju dalam penutupan lokalisasi tersebut. Sedangkan perempuan PSK sebagai obyek utama dalam sebuah lokalisasi harus diketahui sikap dan pandangannya. Pemerintah Kota Surabaya sebagai perwakilan dari negara pun harus menyikapi penutupan lokalisasi ini dengan persiapan yang matang.

III.1. Peta Kekuatan Kepentingan dalam Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak di Kota Surabaya

Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak yang saat itu dilakukan pada tanggal 18 Juni 2014 menjadi momentum yang berarti tindakan prostitusi dan pelacuran sudah mampu dikurangi atau bahkan dihilangkan. Untuk sebagian pihak ada yang merasa diuntungkan dan pihak lainnya merasa dirugikan dengan adanya

penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Oleh karena itu dibutuhkan pemetaan kepentingan dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak agar tampak terlihat bagaimana kepentingan tersebut diartikulasi.

III.1.1. Pemerintah Kota Surabaya (Dinas Sosial Kota Surabaya)

Berdasarkan Profil Dinas dan UPTD 2014 yang didapatkan dalam bentuk file *Microsoft Word* oleh peneliti dari Ibu Rosalia Bagian Umum Dinas Sosial Kota Surabaya, Dinas Sosial pada awalnya merupakan bagian dari Pemerintah Kota Surabaya yang dikenal dengan Bagian Sosial. Lalu pada tahun 2001 dengan tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sebagai penerimaan kewenangan daerah maka Pemerintah Kota Surabaya mengatur kembali Organisasi Dinas Kota Surabaya. Pengaturan ini kemudian ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya yang didalamnya ditetapkan bahwa pemerintah menetapkan pembentukan dinas-dinas di Kota Surabaya terdiri dari 32 dinas yang di dalamnya terdapat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan adalah peleburan dari Bagian Sosial dari Pemerintah Kota Surabaya dengan cabang Dinas Sosial yang merupakan instansi vertikal Pemerintah Kota Surabaya. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan sesuai tupoksinya tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya. Salah satu tugasnya adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan

yang meliputi perencanaan, penyusunan program, penyuluhan, rehabilitasi sosial, penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan perempuan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 maka Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Perda Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya. Dengan adanya perda ini maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dirampingkan menjadi Dinas Sosial Kota Surabaya sedangkan Pemberdayaan Perempuan melebur kedalam Bapemas atau Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Dinas Sosial memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang sosial serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah provinsi. Secara rinci tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab dari Dinas Sosial diatur dalam Keputusan Walikota Nomor 91 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial. Beberapa fungsi dari Dinas Sosial antara lain perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, dan pengelolaan ketatausahaan dinas.

Dinas Sosial kemudian memiliki bagian-bagian atau bidang yang membawahi permasalahan sosial sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial Kota Surabaya. Sesuai dengan kebutuhan peneliti yang bertujuan untuk penelitian yang memiliki fokus kepada pemetaan kepentingan dan sikap dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak di Kota Surabaya, maka peneliti diarahkan untuk menuju

ke Bagian Rehabilitas Sosial. Rehabilitasi Sosial sendiri terbagi lagi kedalam dua sub bidang yakni Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial serta Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat. Peneliti diarahkan atas dasar kesesuaian fokus penelitian maka diarahkan kepada Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial.

Fungsi dari Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Sub Bidang Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial antara lain :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi anak dan tuna sosial.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi anak dan tuna sosial.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitasi anak dan tuna sosial.
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitasi anak dan tuna sosial.
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari beberapa tugas dan fungsi tersebut, dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak yang menjadi pucuk pelaksana adalah bagian di atas. Dinas Sosial Kota Surabaya menjadi bagian dari Pemerintah Kota Surabaya yang membantu dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Bahasa pemerintah bukan menutup lokalisasi melainkan alih fungsi lokalisasi dan alih profesi bagi perempuan PSK.

Saat itu peneliti mendapatkan izin dan waktu untuk mewawancarai Pak Deddy selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pak Indra selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial mengenai penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Seperti penjelasan Pak Deddy dalam wawancara berikut.

“...Itu tidak hanya Dolly, semua lokalisasi yang ada pada waktu itu, ada enam lokalisasi mungkin itu untuk dilakukan. Cuma target-targetnya bukan target penutupan, tapi alih profesi. Alih profesi harapannya nanti karena yang menjadi sasaran Dinsos itu bukan mucikari, bukan ini, tapi WTS nya. Karena WTS itu masuk bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)...”

“...Soalnya anu gandengan sama jadi gini yang dilakukan oleh dinas yang pertama kita melakukan kegiatan sosialisasi, bahkan Ibu Walikota sendiri terus di *breakdown* ke Dinas Sosial juga mengundang. Kalau Bu Walikota itu menyampaikan rencana-rencana Beliau untuk menutup lokalisasi dan yang kedua di *breakdown* oleh Dinas Sosial, Dinas Sosial mengundang hal yang sama itu berkaitan dengan apa sih yang diinginkan oleh mereka. Terus kemudian data itu semua kami catat kemudian kami melakukan pendataan. Baik langsung maupun tidak langsung. Jadi kami memang sudah punya data, kami sendiri juga melakukan yang sama. Setelah melakukan pendataan kami berikut melakukan verifikasi. Karena data yang ada itu kan belum tentu apa namanya hhm sesuai dengan kondisi yang sekarang...”

(Wawancara dengan Pak Deddy, 13 Maret 2015)

Permasalahan WTS atau Wanita Tuna Susila yang pada saat ini dikenal dengan PSK atau Pekerja Seks Komersial memang diklasifikasikan ke dalam tuna sosial sebagai PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Sehingga Walikota Surabaya memberikan amanat kepada Dinas Sosial untuk kemudian membina dan memberdayakan perempuan PSK tersebut. Setelah PMKS dianggap berkurang, maka Dinas Sosial akan bekerja sama dengan Bapemas untuk menangani rehabilitasi pasca penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Kepentingan dari Dinas Sosial adalah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan. Segala persiapan, pelaksanaan, dan perencanaan pasca penutupan

dipersiapkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya yang dibantu dengan beberapa jajaran samping.

Dinas Sosial Kota Surabaya selaku pihak yang memiliki program dalam hal alih fungsi wisma dan alih profesi bagi mucikari dan PSK tidak langsung menutup lokalisasi. Seperti yang dijelaskan pada kutipan Pak Deddy di atas bahwa sebelum ditutup pun Dinas Sosial telah melakukan pendataan, verifikasi, dan pembinaan. Namun wacana untuk menutup lokalisasi di Jawa Timur khususnya bagi Lokalisasi Dolly-Jarak ada sejak tahun 2010 yang dicetuskan oleh Majelis Ulama Indonesia diutarakan oleh Pak Deddy dalam wawancara berikut.

“...Kemudian tanggal 10, eh 2010 ada apa namanya, hhm diwacanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa lokalisasi di Jawa Timur itu harus segera ditutup. Akhirnya keluar surat tahun 2010, saya bulannya lupa. Itu istilahnya agar kegiatan prostitusi di Jawa Timur secara bertahap segera ditutup. 2011 juga diingatkan kembali. Waktu itu Surabaya masih belum serius ya melakukannya, karena kita sudah melakukan pembinaan. Sehingga harapannya kan secara bertahap mereka akan alih profesi. Harapannya seperti itu. Tetapi lama lambat laun, banyak persoalan yang ditimbulkan dengan adanya lokalisasi dan prostitusi. Ada kurang lebih NAPZA, ada HIV/AIDS, dan sebagainya dan ujung-ujungnya ya wilayah merah itu yang jadi persoalan. Sehingga Bu Wali (Ibu Risma) banyak menemukan persoalan-persoalan anak, persoalan duh macem-macem. Sehingga dengan demikian akhirnya Bu Wali memantapkan diri agar sudah waktunya Surabaya itu tidak lagi adanya lokalisasi.”
(Wawancara dengan Pak Deddy, 13 Maret 2015)

Jadi apabila dirunut berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Deddy selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial bahwa Dinas Sosial dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak berkepentingan sebagai dinas yang mempersiapkan segala bahan teknis untuk penutupan lokalisasi. Dalam bahasa Dinas Sosial dan Pemerintah Kota Surabaya bahwa lokalisasi tidak ditutup melainkan dialihfungsikan bangunan wismanya dan dialihprofesikan para mucikari dan

PSKnya. Sesuai dengan surat atau seruan bersama dari MUI dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010, maka instruksi kemudian diturunkan hingga ke wilayah pemerintah daerah dan pemerintah kota. Walikota Surabaya yang pada awalnya menyatakan belum siap untuk menutup Lokalisasi Dolly-Jarak (lihat pada bab II) karena Walikota Surabaya tidak pernah merasa membuka lokalisasi dan alasan lainnya adalah dirasa Dinas Sosial telah melakukan pembinaan, namun atas instruksi, dukungan, serta lebih banyak masalah yang ditimbulkan dengan adanya lokalisasi tersebut, Walikota Surabaya siap untuk menutup lokalisasi di Kota Surabaya.

Dinas Sosial sebagai kepanjangan tangan dari Walikota Surabaya yang mempersiapkan segala hal teknis pada pra hingga pasca pelaksanaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa Dinas Sosial setuju dengan adanya penutupan lokalisasi khususnya Lokalisasi Dolly-Jarak sesuai dengan wawancara dengan Pak Deddy tentang penutupan lokalisasi berikut ini.

“Kalau pemerintah semuanya mendukung ya, semuanya mendukung. Mulai dari Pemprov, Pemkot, sampai kementerian di pusat malah. Kemudian darimana, dari pemerintah itu kan sampai jajaran kelurahan ya, nah terus kemudian yang mendukung lagi dari ini para alim ulama, tokoh agama yang ada disitu. Terus kemudian masyarakat yang tidak punya kepentingan.”

(Wawancara dengan Pak Deddy, 19 Maret 2015)

Kepentingan Dinas Sosial dalam menutup Lokalisasi Dolly-Jarak selain sebagai kepanjangan tangan Walikota Surabaya juga berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial menjalankan programnya berupa Program Penanganan Lokalisasi di Kota Surabaya melalui Kegiatan Alih Profesi WTS dan Alih Fungsi Wisma. Masalah WTS atau PSK dianggap sebagai suatu

masalah kesejahteraan sosial sehingga perlu untuk ditertibkan dan dialihprofesikan agar tidak berkembang lagi di Kota Surabaya.

III.1.2. DPRD Kota Surabaya

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga utama negara bangsa yang berdasarkan pada pemisahan kekuasaan atau *Separation of Power* merupakan badan legislatif atau pembuat undang-undang. Berfungsi sebagai pengawasan untuk memastikan minimalisasi pembebasan oleh eksekutif terhadap warga negara. Oleh karena itu DPR memiliki fungsi normatif yaitu Representasi (harus tunduk kepada kepentingan rakyat sebagai wakil dari suara dan kepentingan rakyat), Legislasi (membuat UU atau peraturan perundangan), dan Kontrol/Pengawasan (mengawasi kinerja eksekutif).

Fungsi normatif tersebut juga dimiliki oleh DPRD Kota Surabaya yang melakukan kontrol atau pengawasan kepada kinerja eksekutif atau Pemerintah Kota Surabaya. Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak juga menjadi satu agenda penting dalam Komisi D yang ada di DPRD untuk menjalankan fungsi Kesejahteraan Rakyat. Komisi ini menjalankan fungsi dalam bidang penanganan bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Sehingga penutupan lokalisasi yang multiaspek ditangani oleh Komisi D DPRD Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan penutupan lokalisasi di Surabaya sempat menyampaikan kepada DPRD Kota Surabaya sebagai hubungan antara pemerintahan eksekutif dan legislatif. Khususnya bagi penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak yang sudah ada sejak berpuluh tahun silam di Kota

Surabaya, sikap yang ditunjukkan oleh DPRD adalah kurang setuju dengan adanya penutupan tersebut. Kurang setuju karena dinilai konsep yang ditawarkan dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak masih belum matang dan membutuhkan waktu beberapa tahun lagi untuk menangani dampak penutupan lokalisasi tersebut. Konsep yang matang tidak hanya ditujukan bagi persiapan untuk PSK, mucikari, dan masyarakat terdampak di sekitar lokalisasi, melainkan kepada para pengguna yang harus diantisipasi agar tidak terus tergantung pada kegiatan prostitusi tersebut, hal ini yang diungkapkan oleh Bapak Anugrah Ariyadi dari Komisi D DPRD Kota Surabaya berikut ini :

“Nah ketika mulai muncul keinginan Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan penutupan Dolly itu, sebenarnya kan terjadi pro dan kontra. Dalam hal ini DPR itu dalam posisi yang kontra dengan kebijakan walikota. Bukan masalah apa dan sebagainya tidak. Jadi artinya kita waktu itu menyarankan pada pemerintah kota Surabaya untuk sebelum melakukan kegiatan itu menyiapkan dulu solusi-solusi yang terbaik buat kawan-kawan itu. Yang dipikirkan jangan hanya kawan-kawan yang bekerja sebagai PSK nya, atau juga mucikarinya, atau juga dampak di sekitar lingkungan karena awalnya ada pekerjaan kemudian tidak bekerja, nah tetapi dampak yang lebih luas lagi yaitu para pengguna jasanya. Jadi selama ini kan yang dipikirkan oleh pemkot *pokok'e tutup saja*”
(Wawancara dengan Bapak Anugrah Ariyadi, 13 April 2015)

DPRD Kota Surabaya menginginkan konsep yang matang sebelum dilakukan penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak mengingat lokalisasi ini merupakan yang terbesar di Jawa Timur dan sudah berpuluh tahun berada di Surabaya. Dijadikan “khas” Kota Surabaya, Lokalisasi Dolly-Jarak seolah dibiarkan menjadi legal oleh Pemerintah Kota Surabaya karena tidak ada kejelasan mengenai waktu penutupan lokalisasi tersebut. Saran yang diberikan kepada Pemerintah Kota Surabaya adalah apabila memang lokalisasi merupakan salah satu pemasukan untuk daerah, mengapa tidak dikelola dengan konsep yang sama terjadi di negara-

negara lainnya seperti di Thailand yang memiliki Pattaya, Australia yang memiliki Christmast Island, dan beberapa negara lain yang memang menerapkan *Red Light District* atau kawasan khusus bagi kegiatan prostitusi sehingga pajaknya jelas bagi para pelaku kegiatan prostitusi seperti yang diungkapkan Pak Anugrah berikut ini:

“*Human Trafficking* memang tidak boleh. Dilarang, tetapi ini kan sesuatu kegiatan yang juga tidak ilegal. Karena puluhan tahun dia ada disana, dan puluhan tahun pemerintah kota Surabaya juga mendapatkan PAD dari sana. Mereka tidak cuma-cuma lo, mereka ada pungutan juga lo. PAD-PAD yang masuk ke pemerintah kota dan sebagainya.”
(Wawancara dengan Bapak Anugrah Ariyadi, 13 April 2015)

Tidak merekomendasikan untuk ditutup, DPRD Kota Surabaya justru lebih setuju apabila Lokalisasi Dolly-Jarak ditata dengan rapih dan secara bertahap ditutup melalui konsep yang matang. Apabila memang terpaksa harus ditutup atas instruksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka lokalisasi harus ditutup dengan konsep juga. Konsep yang dimaksudkan oleh anggota dewan adalah dengan melakukan reduksi umur para PSK yang datang ke Lokalisasi Dolly-Jarak untuk bekerja.

Hampir 95% para perempuan PSK memiliki KTP di luar kota Surabaya, sehingga yang perlu dibatasi adalah jumlah umur mereka yang datang dan kemudian berhenti untuk melakukan kegiatan prostitusi. Contohnya adalah batasan usia yang boleh bekerja di lokalisasi adalah umur 21 hingga 25 tahun, selebihnya sudah harus pensiun dan melakukan pekerjaan lain. Setiap tahun batasan umur tersebut dikurangi, yang awalnya 21 tahun lalu menjadi 22 tahun sehingga perempuan PSK tersebut lebih siap apabila ada penutupan lokalisasi sewaktu-waktu. Hal itu yang kurang menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya dengan memberlakukan peraturan yang ketat di lokalisasi.

Selain melakukan reduksi umur sebagai penawaran konsep, masalah wisma yang ada di Lokalisasi Dolly-Jarak juga bisa dijadikan alternatif pilihan. Sekitar 70% wisma yang ada disewa oleh mucikari sedangkan 30% merupakan pemilik asli wisma. Alternatif yang ditawarkan adalah mendudukkan para pemilik wisma ini untuk melakukan pembatasan perjanjian sewa wisma secara hitam di atas putih dengan Pemerintah Kota Surabaya. Harus ada kesepakatan bahwa wisma yang disewa selama beberapa tahun sudah siap ditinggalkan dan dijual kepada Pemerintah Kota Surabaya sesuai kesepakatan.

Dengan kepastian seperti ini, pemilik wisma pun tidak perlu susah untuk menegosiasi ulang apakah wisma tersebut dijual kepada Pemerintah Kota Surabaya ataupun dialihfungsikan sebagai kontrakan atau kos-kosan. Langkah ini juga harusnya menjadi pertimbangan penting dan tidak berdampak seperti sekarang. Wisma-wisma yang ada di Lokalisasi Dolly-Jarak dibiarkan kosong dan belum semuanya dijual kepada Pemerintah Kota Surabaya. Hanya wisma Barbara di Gang Dolly yang sudah dijual dan menjadi aset Pemerintah Kota Surabaya.

DPRD Kota Surabaya menilai bahwa penutupan lokalisasi Dolly-Jarak kurang memperhatikan multi aspek yang menjadi fokus utama dalam penutupan lokalisasi itu sendiri. Sampai pada saat DPRD Kota Surabaya tidak memberikan anggaran yang digunakan dalam alokasi dana penutupan lokalisasi di Surabaya khususnya Dolly-Jarak dengan pertimbangan konsep yang kurang matang tersebut. Anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya memang tidak sedikit mengingat yang dibutuhkan adalah koordinasi dengan instansi lain,

pengamanan di lapangan, pembebasan lahan, dan fungsi teknis lainnya seperti yang diungkapkan oleh Pak Anugrah berikut ini:

“Nah kita melakukan waktu itu pada pemerintah kota seperti itu. Sampai-sampai kita juga melakukan suatu upaya menghentikan kegiatan itu dengan cara tidak memberikan anggaran itu membebaskan itu.”
(Wawancara dengan Bapak Anugrah Ariyadi, 13 April 2015)

Waktu koordinasi dan penyampaian kepada DPRD Kota Surabaya memakan waktu tidak kurang dari satu tahun. Secara luas memang tidak dipaparkan konsep penutupan, namun hanya mengejar target tertentu, sehingga anggota dewan berusaha menghambat rencana penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Kota Surabaya belum mampu mempersiapkan solusi kepada seluruh aspek masyarakat yang ada di dalam lokalisasi tersebut. Solusi yang ditawarkan belum menyentuh unsur pengguna atau *user* dalam bisnis prostitusi tersebut. Padahal sebenarnya para PSK dan mucikari bekerja berdasarkan *supply and demand* seperti halnya dalam ilmu ekonomi. Perempuan yang dipekerjakan membutuhkan uang dan para pengguna membutuhkan kepuasan seksual, begitu seterusnya hingga ada yang memotong rantai proses prostitusi tersebut.

Menjadi agenda penting Komisi D DPRD Kota Surabaya selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan dengan adanya penutupan lokalisasi di Surabaya. Menjamurnya hotel kelas melati yang digunakan dalam waktu *short time* merupakan salah satu dampak penutupan lokalisasi. Sehingga kegiatan prostitusi yang sudah tidak lagi dilokalisir menjadi tersebar dan tidak bisa terdata secara statistik. Para perempuan PSK yang memilih untuk terus menjajakan tubuhnya kemudian pindah ke tempat-tempat karaoke dan ruko-ruko tertentu agar

operasinya terus berjalan tanpa tersentuh oleh Pemerintah Kota Surabaya. Hadirnya PSK dari luar negeri pun di dalam tempat karaoke menjadi primadona baru bagi pelaku bisnis seks di Surabaya dengan sebutan *chunwok* yang bertarif kelas menengah ke atas mulai dari Rp 600.000,00 hingga jutaan rupiah. Hal ini yang disayangkan sebagai dampak dari penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak menurut pandangan Pak Anugrah berikut ini :

“Yang ada di Surabaya sekarang tarifnya 600.000 ke atas. Itu masih ada banyak. Kalau mau disurveikan tak tunjukkan tempatnya masih banyak yang 600.000 ke atas dan itu hidup. Artinya dibiarkan.

Iya dibiarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya karena dalam tanda kutip tidak menegerti ya memang mereka tidak di kampung. Di ruko-ruko gitu kan. Siapa yang terganggu kan tidak ada yang terganggu. Masyarakat sekitarnya kan tidak ada yang terganggu.

Hotel-hotel short time-an itu. Begitu caranya. Apakah mereka-mereka dibacking oleh pengusaha-pengusaha itu pemerintah kota ini. Karena mereka ada kepentingan disini. *Iku yo sapuen*. Artinya kalau Dolly nggak ada kan mereka laku. Loh kalo kesana coba malem minggu itu uantri. Ini ngomong anu ya dampaknya itu antri. Saya kesana survei saya amati.”

(Wawancara dengan Bapak Anugrah Ariyadi, 13 April 2015)

Kepentingan DPRD Kota Surabaya dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak sebagai badan legislatif yang juga memiliki fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kota Surabaya sebagai badan eksekutif. Peran koordinasi yang dilakukan antara DPRD dan pemerintah kota ternyata tidak sejalan, sehingga DPRD Kota Surabaya kurang setuju dengan konsep yang ditawarkan dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Selain itu DPRD juga melihat bahwa dengan konsep yang kurang matang, maka dampak yang ditimbulkan tidak bisa diantisipasi dengan baik dan menimbulkan permasalahan baru. Kepentingan lainnya sebagai pemilik fungsi anggaran atau *budgeting*, DPRD Kota Surabaya memilih untuk tidak mengalokasikan dana untuk penutupan Lokalisasi Dolly-

Jarak karena fokus yang diselesaikan belum mampu dicarikan jalan keluar. Dalam artian yang menjadi fokus hanya PSK, mucikari, dan masyarakat terdampak, sedangkan para pengguna atau *user*nya masih belum diselesaikan.

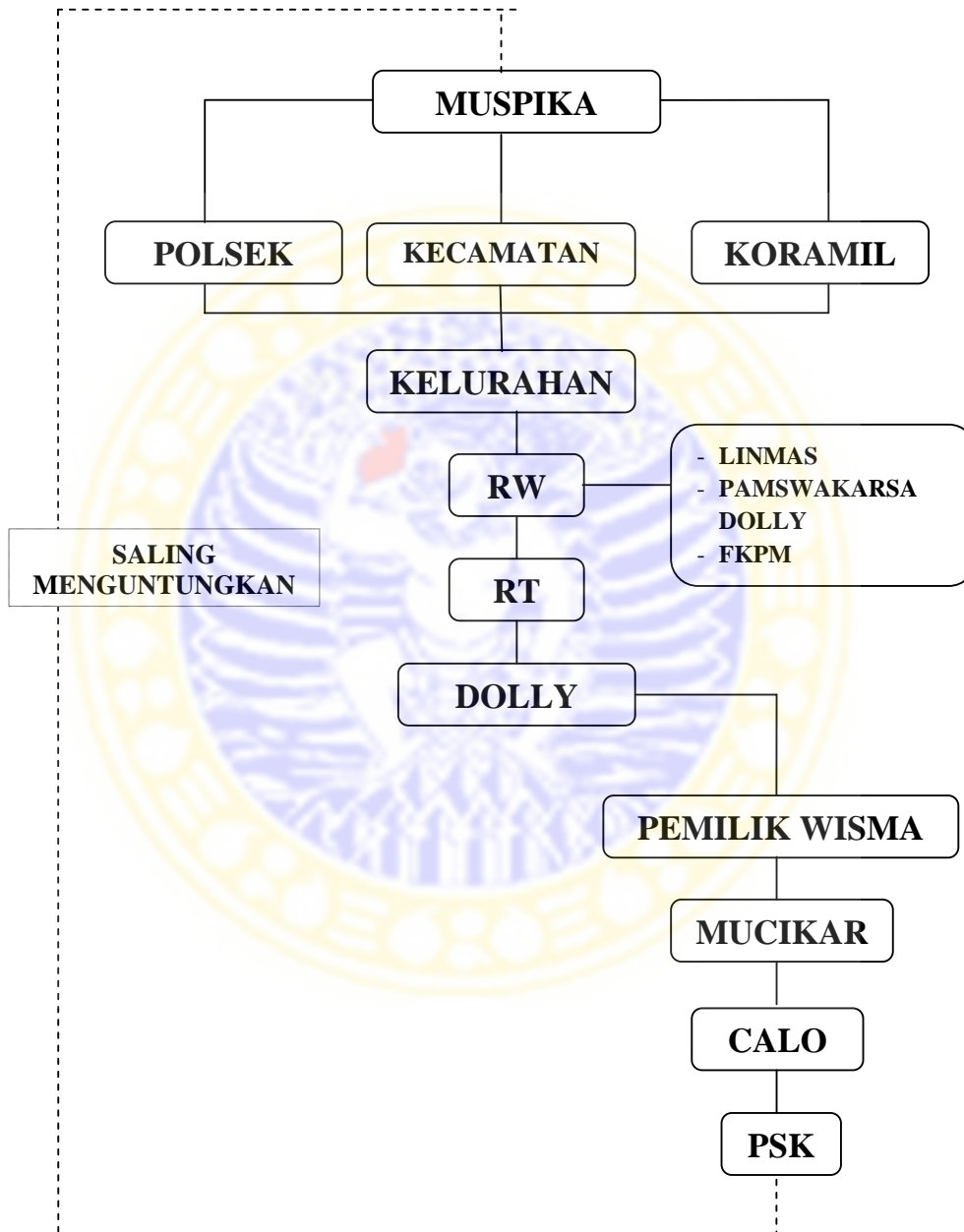
III.1.3. Camat Sawahan

Kecamatan Sawahan merupakan bagian wilayah administratif Kota Surabaya yang terdiri dari beberapa kelurahan. Salah satunya adalah Kelurahan Putat Jaya dan terdapat Lokalisasi Dolly-Jarak. Kecamatan Sawahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh unsur lainnya yakni Koramil dan Polsek yang kemudian dikenal dengan nama Muspika atau Musyawarah Pimpinan Kecamatan.

Komando Rayon Militer (Koramil) merupakan sebuah satuan dari TNI di tingkat kecamatan yang langsung berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil. Di Kecamatan Sawahan, Koramil memiliki tugas untuk menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala gangguan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar terutama dalam pengamanan di Lokalisasi Dolly-Jarak.

Kepolisian Sektor (Polsek) merupakan bagian dari satuan Polri di tingkat kecamatan dan bertugas untuk menyelenggarakan tupoksi Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, ketertiban umum, pengyaoman dan pelayanan pada masyarakat. Di Kecamatan Sawahan, Polsek biasanya menjadi tempat pengaduan masyarakat serta bertugas untuk merazia dan pengamanan terhadap Lokalisasi Dolly-Jarak.

Bagan III.1
Struktur Hubungan Muspika yang Bekerja Sebelum Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak



Sumber : Wicaksono, Ganang Aditya. 2012. "Delegitimasi Kebijakan Penataan Ulang Wisata Prostitusi Dolly : Studi Deskriptif Perlawanan Komunitas Dolly". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program Sarjana. Universitas Airlangga. Surabaya.

Muspika di Kecamatan Sawahan sebelum adanya penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak lebih memusatkan perhatian kepada keberadaan lokalisasi tersebut. Karena perlu adanya pengawasan dan pengamanan yang ketat dari berbagai pihak agar kegiatan prostitusi di lokalisasi tidak berubah menjadi kriminalisasi dan membahayakan masyarakat. Dalam bagan di atas dijelaskan hubungan yang ada di dalam Lokalisasi Dolly-Jarak, mulai dari tingkat kecamatan hingga kepada PSK yang bekerja di lokalisasi. Disebut saling menguntungkan karena dengan adanya lokalisasi, berarti ada pemasukan kepada kecamatan sebagai bentuk pengamanan agar kegiatan prostitusi di lokalisasi terus berjalan. Pendapatan biasanya diberlakukan bagi hasil atau uang keamanan yang diberikan dari tiap wisma kepada pihak hansip atau linmas agar wisma milik mereka tetap aman.

Seperti disebutkan dalam bab dua bahwa ada beberapa RW yang di dalamnya terdapat wisma-wisma. Wisma ini masih terus beroperasi walaupun ada Muspika sebagai pengontrolnya. Linmas dan Koramil atau Polsek biasanya melakukan razia patroli dengan tujuan untuk menertibkan kawasan Lokalisasi Dolly-Jarak agar tidak menimbulkan kriminalitas dan hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga keberadaan Muspika bisa disebut saling menguntungkan atau bersimbiosis mutualisme dengan pelaku kegiatan prostitusi.

Setelah adanya penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak, Muspika masih beroperasi dan melakukan tugasnya namun hubungan yang ada tidak lagi sama dengan sebelum penutupan, karena mata rantai yang saling menguntungkan itu telah diputus oleh Pemerintah Kota Surabaya. Gang Dolly memang masih ada, deklarasi penutupan sudah dilakukan, namun simbiosis mutualisme itu sudah

tidak ada lagi karena para PSK nya dipulangkan dan sebagian memilih untuk keluar dari kawasan Lokalisasi Dolly-Jarak, perempuan PSK dan mucikarinya sudah beralih profesi dan pindah ke tempat lain, sehingga pemasukan sudah tidak ada lagi ke kantong Kecamatan Sawahan.

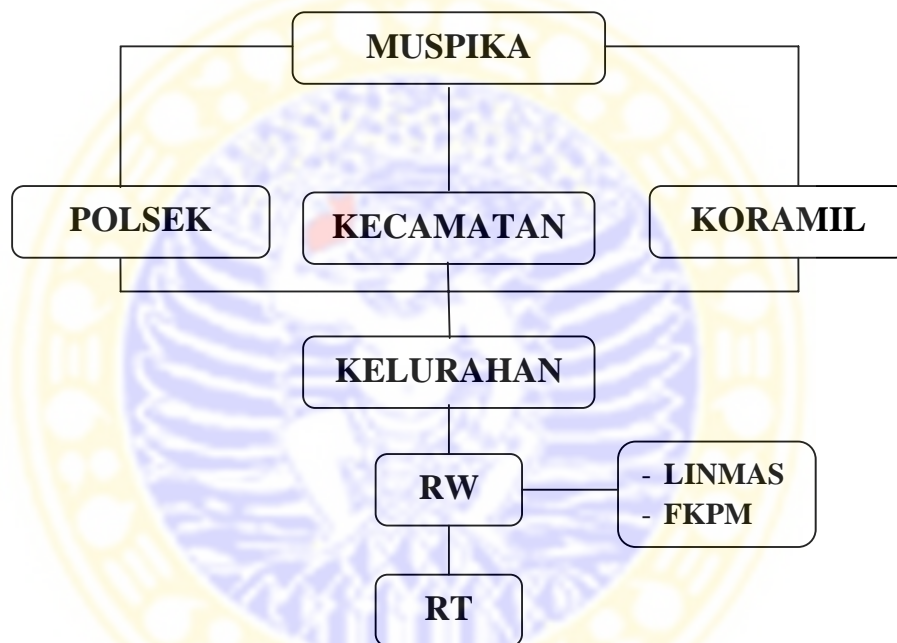
Kecamatan Sawahan selaku bagian dari Pemerintah Kota Surabaya juga menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wilayah administratif dibawah Kota Surabaya yang terdiri dari beberapa kelurahan. Sehingga instruksi dan koordinasi yang diberikan oleh pemerintah kota harus dilaksanakan. Camat Sawahan sendiri menilai bahwa penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak disetujui oleh seluruh aparat yang dikoordinasi Pemerintah Kota Surabaya seperti yang diungkapkan oleh Pak Yunus dalam wawancara berikut ini :

“Hampir semua aparat, Kementrian juga punya andil, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, TNI, Polri, semuanya, pada level persiapan, pada level pelaksanaan, pada level proses, semuanya punya andil, semua mempunyai peran sesuai dengan tugas masing-masing. Masyarakat punya andil, ulama, semua ini, sesuai bidang tugas dan kewenangan, minimal masyarakat ini mendoakan, apa tidak bergeming, ada yang nampak dan ada yang tidak nampak, semuanya.”
(Wawancara dengan Bapak Yunus, 14 April 2015)

Menurut Camat Sawahan Bapak Yunus, penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak seperti sebuah titik puncak dimana masyarakat dan pemerintah berusaha memperjuangkan besarnya kepentingan masing-masing. Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk melaksanakan instruksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan menjalankan program kesejahteraan sosial. Sedangkan masyarakat yang menolak penutupan bertujuan untuk mempertahankan sumber hidup dan pendapatan mereka yang berasal dari kegiatan yang ada di Lokalisasi Dolly-Jarak atau mempertahankan urusan perut.

Sehingga dengan adanya penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak, maka hubungan kerja Muspika di Kecamatan Sawahan tidak lagi menjadi saling menguntungkan, melainkan secara hierarki murni sebagai hubungan antara lembaga pemerintahan dibawah koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Bagan III.2
Struktur Hubungan Muspika yang Bekerja Setelah Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak



Muspika atau Musyawarah Pimpinan Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Sawahan, Polsek, dan Koramil berfungsi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kecamatan membawahi beberapa kelurahan dan terfokus pada Kelurahan Putat Jaya. Kelurahan Putat Jaya memiliki beberapa RW yang dibantu dengan linmas dan FKPM atau Forum Kemitraan Polisi Masyarakat. Satuan terkecil dari hubungan hierarki tersebut adalah pada RT yang terdiri dari beberapa kepala keluarga. Apabila diamati, setelah penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak, tidak

ada lagi hubungan ke Dolly yang sebelumnya terpetakan hingga ke pekerja PSK. Hal ini dikarenakan penutupan lokalisasi membuat pemutusan hubungan antara RT kepada para pelaku prostitusi di lokalisasi.

Kepentingan yang nampak dengan adanya penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak oleh Kecamatan Sawahan adalah menjalankan koordinasi dan instruksi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu agar tercipta fungsi hierarki pemerintahan dan fungsi Musyawarah Pimpinan Kecamatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparaturnya yang ada. Menekan dampak negatif dari adanya lokalisasi, Camat Sawahan pun lebih setuju apabila penutupan lokalisasi dilakukan agar masyarakat mampu hidup dengan aman dan sejahtera tanpa masalah dari kegiatan prostitusi di Lokalisasi Dolly-Jarak.

III.1.4. Lurah Putat Jaya

Kelurahan Putat Jaya yang berada di Kecamatan Sawahan menjadi bagian dari Pemerintah Kota Surabaya yang bertanggung jawab atas kependudukan yang ada di daerah tersebut. Secara administratif bahwa Lokalisasi Dolly-Jarak berada di Kelurahan Putat Jaya. Sehingga lurah juga menjalankan fungsinya sesuai dengan arahan Pemerintah Kota Surabaya. Berhubungan dengan penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak, kelurahan sudah melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan kepada pihak-pihak yang nantinya akan terdampak penutupan seperti PSK, mucikari, dan masyarakat sekitar. Besar harapannya agar mereka sudah siap ketika momentum penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Bambang sebagai Lurah Putat Jaya berikut ini.

“Hm hubungan kelurahan secara hirarki antara pemerintah kota dan kelurahan itu sudah jelas. Kelurahan itu ada di dalam pemerintah kota. Kita menjalankan arahan sesuai dengan pemerintah kota, kita sampaikan, kita lakukan, kita melaksanakan sosialisasi, melakukan pelatihan kepada mereka baik mucikari maupun PSK nya untuk persiapan bekal pada saatnya nanti mereka akan ditutup.”
(Wawancara dengan Pak Bambang, 14 April 2015)

Proses sosialisasi tentang penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak oleh Kelurahan Putat Jaya telah dilakukan sejak tahun 2011. Diperuntukkan kepada mucikari dan PSK agar mereka bisa alih profesi dan tidak lagi berhubungan langsung dengan kegiatan prostitusi. Selain itu, lurah juga melakukan sosialisasi terkait alih fungsi bangunan wisma-wisma di lokalisasi karena bangunan yang ada menyalahi peraturan dalam Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Mendirikan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila. Upaya sosialisasi dilakukan secara berkala paling tidak satu bulan sekali dibantu dengan tokoh agama, tokoh masyarakat di sekitar lokalisasi, Dinas Sosial, dan Bapemas. Biasanya sosialisasi dilakukan melalui pertemuan khusus dengan para PSK dan mucikari atau melalui kegiatan keagamaan seperti pengajian dan siraman rohani.

Lurah Putat Jaya berpandangan bahwa sudah saatnya Lokalisasi Dolly-Jarak ditutup karena berdampak negatif bagi kehidupan dan tumbuh kembang anak-anak yang berada di sekitar lokalisasi. Belum saatnya anak-anak untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa, banyak pula Kekerasan Dalam Rumah Tangga akibat prostitusi di sekeliling mereka karena banyak yang main *affair*, dan kejadian hamil di luar nikah. Hal tersebut sudah sangat mengkhawatirkan. Pengaduan mereka langsung kepada pihak Kelurahan Putat

Jaya untuk diminta menanganinya. Seperti yang diungkapkan Pak Bambang dalam wawancara berikut ini.

“... Sebetulnya itu bukan ikon, nah masalah penutupan itu memang sudah waktunya penutupan itu. Karena apa, dampak dari keberadaan lokalisasi itu bagi kehidupan anak-anak sangat berpengaruh jelek kepada perkembangan, tumbuh kembang anak-anak yang ada disana. Mereka dewasa sebelum waktunya, mereka tahu hal-hal yang semestinya belum dia tahu, dia sudah tahu duluan. Dan banyak kejadian-kejadian yang ada di masyarakat sekitar lokalisasi belum waktunya dia hamil di bawah umur, ada KDRT, itu sering terjadi seperti itu. Dan juga keamanan.”

“Iya itu sangat berpengaruh sekali, sehingga mereka tidak bisa konsentrasi belajar, pada saat ada yang seperti “itu” dan berdekatan dengan kamarnya. Itulah yang dulu.”

(Wawancara dengan Pak Bambang, 14 April 2015)

Keadaan Lokalisasi Dolly-Jarak yang dahulu dengan sekarang dirasakan betul mengalami perbedaan. Apabila dahulu hanya dengan duduk-duduk dan menyentuh pekerjaan yang berhubungan dengan prostitusi dapat dijadikan lahan basah memperoleh uang, namun tidak dengan keadaan sekarang. Kelurahan Putat Jaya juga sedang berusaha untuk terus menjalankan pembinaan dan pemberdayaan kepada mantan PSK, mantan mucikari, dan masyarakat terdampak dibantu dengan beberapa dinas, instansi, atau SKPD lainnya untuk dapat menyalurkan program bantuan tersebut.

Program yang diberikan sebagai upaya pembinaan juga tidak bisa terlaksana maksimal apabila pola pikir masyarakat belum dapat diubah bahwa melaksanakan pekerjaan lain diluar kegiatan prostitusi juga bermanfaat. Perlu kesadaran dari pihak yang mendukung perubahan pola pikir tersebut, perlu kesabaran ekstra karena biasanya proses memakan waktu yang lumayan lama ketika seseorang memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan lama, perlu adaptasi

dengan hal-hal baru bagi mereka hingga bisa ahli dan mampu menghidupi diri sendiri dari usahanya. Contoh yang biasanya diberikan sebagai perumpamaan adalah perubahan di Lokalisasi Dupak Bangunsari yang sekarang sudah banyak sentra usaha ekonomi menengah dan hasilnya sudah mampu dipasok ke berbagai daerah ke dalam dan luar negeri. Sentra ini merupakan kerajinan tangan dan membuat. Dengan adanya pola pikir baru menjadi dasar bahwa masyarakat beserta mantan PSK dan mucikari menginginkan taraf hidup yang lebih baik namun tidak bisa dilihat dalam hitungan minggu atau bulan melainkan sekian tahun kemudian sejak perubahan tersebut terjadi. Harapan perubahan ini dijelaskan oleh dua informan berikut ini.

“Di mindset mereka ya mental mereka ya harus berubah kepada kehidupan yang lebih baik. Tidak mungkin sekarang mereka meninggal dengan cara seperti itu. Mereka dalam meninggal mereka sudah tua-tua apakah tidak emam gitu lho. Meninggal sia-sia tidak ada yang dikerjakan, tidak ada segi positifnya, yang dibawa sebagai bekal mereka untuk kemudian mati ya, nah inilah yang kemudian menjadi apa, pemikiran kita bahwa mereka harus berbuat baik.”
(Wawancara dengan Pak Bambang, 14 April 2015)

“Merubah *mindset* itu memang ngga gampang. Yang biasanya duduk-duduk, yang biasanya jadi tukang parkir, atau menyewakan wismanya sudah dapat duit, tetapi sekarang dia sudah harus bekerja, harus bekerja keras seperti itu. Jadi sebetulnya perlu waktu untuk bisa mengendalikan pada posisi yang sebenarnya. Perlu waktu, perlu kesabaran, perlu modal, perlu perubahan. Meskipun tidak dirubah secara signifikan karena disana wilayah pemukiman. Bukan untuk didirikan perusahaan besar bukan seperti itu. Ya tetap menggunakan daerah pemukiman tinggal bagaimana menumbuhkan tingkat ekonomi yang baik dengan menambah beberapa sektor-sektor usaha. Begitu juga yang dilakukan, jadi tidak bisa dalam waktu satu tahun kita sudah bisa melihat hasilnya.”
(Wawancara dengan Pak Deddy 13 Maret 2015)

Keperntingan dari Lurah Putat Jaya dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak antara lain sebagai sebuah lembaga dinas yang berada di bawah Pemerintah Kota Surabaya, Lurah Putat Jaya setuju dengan adanya penutupan tersebut. Penutupan lokalisasi merupakan momentum yang tepat untuk mengakhiri segala permasalahan sosial dan kemasyarakatan yang selama ini banyak diadukan kepada Lurah Putat Jaya.

Sebelumnya sempat beredar rumor dan kabar bahwa Kelurahan Putat Jaya menerima pemasukan dari adanya kegiatan prostitusi di Lokalisasi Dolly-Jarak. Pemasukan tersebut sebagai uang panjar agar lokalisasi terus dijalankan tanpa terganjal oleh isu penutupan dan pengalihfungsian lokalisasi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Lurah Putat Jaya, tidak ada pemasukan ke kelurahan. Kelurahan Putat Jaya melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

III.1.5. RW di Kelurahan Putat Jaya

Ketua RW di Kelurahan Putat Jaya yang memiliki keperntingan di Lokalisasi Dolly-Jarak antara lain RW III dan RW VI. Letak RW III berada di Lokalisasi Jarak, sedangkan RW VI berada di Lokalisasi Dolly. Peneliti mengambil dua RW ini untuk mengetahui bagaimana keperntingan yang dimiliki oleh RW tersebut dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak.

RW III memiliki 11 RT yang terdiri dari 6 RT non lokalisasi dan 5 RT lokalisasi. Sebagai RW yang memiliki jumlah RT terbanyak, peran sebagai Ketua

RW sangat diharapkan oleh masyarakat di kawasan Lokalisasi Jarak agar mampu menjembatani kepentingan Pemerintah Kota Surabaya dengan masyarakat. Operasional RW dibantu dengan staf RW, ketua RT, dan pengamanan dari Linmas Lokalisasi. Linmas ini dibentuk dengan tujuan untuk mengamankan wilayah RW yang memiliki kompleks lokalisasi di dalamnya. Wilayah RW III berada di dalam Jalan Putat Jaya sehingga berdekatan langsung dengan pemukiman padat penduduk.

RW VI memiliki 6 RT yang wilayahnya berada di dekat Lokalisasi Dolly. Untuk wilayahnya sendiri, RW VI hanya termasuk ke dalam sebagian kecil wisma yang berada di Gang Dolly. Gang Dolly yang dimaksudkan hanya 1 gang yang berada di Jalan Kupang Gunung Timur 1. Selebihnya wilayah lain tidak masuk dalam Lokalisasi Dolly.

Saat penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak dilaksanakan, beberapa RW merasa bahwa mereka berada di dalam posisi netral. Netral yang dimaksudkan adalah ikut mendukung program pemerintah karena sebagai pemilik kewenangan tertinggi di Kota Surabaya namun di sisi lain pihaknya harus memperjuangkan kepentingan warga yang termasuk dalam perkampungan penduduk maupun kompleks Lokalisasi Jarak yang berada di RW III seperti yang diungkapkan oleh Ketua RW III dalam kutipan wawancara berikut ini :

“Sekitar non lokalisasi itu ada 6 RT, terus lokalisasi, eks lokalisasi ada 5 RT. Saya pun juga mendukung program pemerintah. Ya tapi dalam arti yang jelas saya mendukung sekali tapi saya ini berhadapan dengan masyarakat. Bingung saya. Dalam era penutupan itu bingung. Itu dilema. Saya nggak mbelani masyarakat ini jarene yo’opo gitu lo. Mbelani pemerintah itu ya seperti itu. Maksud saya dilema begitu. Sebab apa memang dalam arti sosialisasi yang penting gini lo masyarakat itu dijak ngomong dijak ngobrol. Jadi itu akan ada suatu kepastian. Gini lo apa

maune masyarakat yang ada di putat jaya ini. Ini dari masyarakat lo, ngga tau kalo dari unsur-unsur luar saya nggak tahu. Sebab yang saya dapat di masyarakat itu ya sperti itu. Ayolah ngomong, ayolah komunikasi sehingga masyarakat ini enak gitu lo.”

(Wawancara dengan Pak Tjukup, 29 April 2015)

Sikap netral yang diambil Ketua RW III ini dilatarbelakangi karena harus mengakomodir dua kepentingan sekaligus. Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan penutupan namun tidak diimbangi dengan komunikasi dua arah kepada masyarakat. Sedangkan harapan masyarakat adalah aspirasinya mampu diakomodir oleh pemerintah dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Aspirasi yang dimaksudkan adalah sumbang ide dan saran agar yang tercapai adalah *win-win solution*. Hal yang bisa dilakukan oleh Ketua RW ketika masa penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak adalah meredam masyarakat agar tidak terus berkeluh kesah dan melakukan tindakan yang tidak diinginkan karena kekecewaan masyarakat kepada pemerintah seperti yang diungkapkan Ketua RW III berikut ini:

“Iyo podo tak jawab “podo aku yo sambat”. Ya kan kita meredam lah, jadi dia berbicara menyulut api,kita kasih air. Gitu loh. Jadi tidak ada satu konflik horizontal. Sebab apa orang itu rawan kalo masalah ekonomi. Kita berbicara sedikit bisa menyinggung bisa gitulo. Aku lo tadi udah bilang, orang itu pendidikannya disini yang pengelola lo, bukan yang anu. Yang pengelola itu minim pendidikannya. Kalo udah minim, kalo kena omongan, de’e curhat enak. “Iki yo’opo pak ? iki kok ngene”. “Yo ya’opo mane lah, awak dewe kan ngene. Iku salahmu dewe loh”. Itu akan jadi suatu bumerang buat saya. Bahkan saya tak redam, dek! “Piye ? yo’opo mene rek yo kan awak dewe kenek imbase. Podo nggak kon tok”. Lo kan enak kan. Cara bicarannya penyampaiannya enak kan. Podo-podo gak karuane iki wah. Gitu kan enak, “sukur kon kenek imbase” otomatis kan marah dia kalo dipanas-panasi ya kita redam jadi air. Cara penyampaian pembicaraan saya ya seperti itu. Sehingga tidak ada gejolak-gejolak gitu lo.

(Wawancara dengan Pak Tjukup, 29 April 2015)

Konflik horizontal memang rawan timbul di masyarakat yang terkena dampak dari penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Karena yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya beserta jajarannya bukan hanya masalah prostitusi, namun juga masalah sosial dan ekonomi dari masyarakat di sekitar lokalisasi yang harus dituntaskan akar permasalahannya. Selain melakukan pendekatan verbal dan pendekatan kekeluargaan, pihak RW berusaha untuk menyosialisasikan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya apabila ada oknum yang melanggar.

Peran RW dalam sosialisasi peraturan kepada masyarakat sangat diperlukan karena belum tentu masyarakat paham dengan apa yang dicantumkan sebagai peraturan. Terutama sosialisasi kepada masyarakat yang taraf pemahamannya masih rendah sehingga perlu waktu penyampaian yang tepat seperti yang diungkapkan Ketua RW III berikut ini :

“Resikonya besar kalo kita melanggar pasal yang *ditemplekno iku* (ditempelkan itu) yang ada pasal-pasalnya saya sosialisasi ke masyarakat itu ya seperti itu. Bahkan kalo nanti melanggar aturan pemerintah akan terjerat pasal ini. *Gelem ta sampeyan diringkuk nang penjara ?* (Apakah Anda mau mendekam di penjara?) saya memberikan dorongan. Saya memberikan pasal-pasal itu, dia harus tahu gitu. Supaya apa nggak salah. Taraf pendidikan masyarakat disini ya rata-rata masih dibawah. Dan orangnya kuper.”

(Wawancara dengan Pak Tjukup, 29 April 2015)

Sikap netral yang disebutkan di atas sebagai bentuk kepentingan RW di lokalisasi kemudian berubah menjadi kepentingan yang menolak penutupan lokalisasi karena alasan terhambatnya pemasukan ke dalam kas RW. Hilangnya sumber pendapatan ke RW juga berpengaruh kepada kegiatan atau operasional dalam RW itu sendiri. Selama ini sering terdengar pemberitaan maupun

perbincangan bahwa RW mendapatkan pemasukan dari hidupnya Lokalisasi Dolly-Jarak, ternyata pemberitaan tersebut dibenarkan oleh Ketua RW III dan Ketua RW VI dalam kutipan wawancara berikut ini :

“Saya pun ikut terdampak juga, tidak ada pemasukan katankanlah di RW. Terus saya program-program dari PKK, karang taruna maupun lansia kan mustahil kalo organisasi nggak ada dana kan bisa jalan nggak ? terus kalo nggak bisa jalan lo duik’e sopo. Otomatis uang pribadi kan. Lah ini lo. Saya pun ikut terdampak masalahnya seperti itu.”

“*Sampeyan* loh ya kalo nggak percaya tanyakan 5 RW. *Sampeyan* setiap bulan ya bukan gaji kan itu dari pemerintah. Ya itu istilahnya timbal balik ngono ae. Katakanlah uangnya dari pemerintah itu ngga seberapa, ya paling 300 berapa gitu. Nah itupun untuk kebutuhan bayar *banyu* (air) listrik yang ada di Balai lo bukan pribadi lo itu udah habis. Padahal itu intensif hak penuh RW kan. Itupun sebabnya saya kembalikan lagi kesitu. Terus *lek ngga onok dana ikulo, wong saiki karang taruna ikulo* sing tingkat kecil apalagi saya membawahi 11 RT, *iku lek nggak onok dana iku* otomatis bagaimana gituloh. Sekarang dana hibah, yo dana hibah sing yaopo. Tarik masyarakat, lawong masyarakate wis ngga karuan kok ditarik. Ekonomine wes anjlok malah nggak karuan, gitulo, saya masih memperhatikan masyarakat dalam hal ini. Kalo nggak memperhatikan tak tarik opo’o. Tapi saya orangnya nggak seperti itu.”
(Wawancara dengan Pak Tjukup, 29 April 2015)

“Kalo ini sebenarnya tabu, tapi kan kita apa adanya. Ini menyangkut bapak muspika, kita ini hanya meneruskan saja. Saya meneruskan ya. Ada kebijakan-kebijakan itu memang operasional RW itu dapat bantuan dari situ (lokalisasi). Nah terus istilah bahasa *aluse* itu operasional *nek aku ngarani nang ngeke’i muspika engkok nggak enak*. Tapi yang dulu. Yang uang di saya itu ya saya kasihkan koramil, bukan koramil sekarang ya, yang dulu. Nah ya kepolisian, dan kecamatan itu istilah muspika. Juga saya kasihkan pak RT pak RT walaupun itu sedikit juga saya buat operasional RW ya. Ya buat gaji linmas itu juga saya gunakan untuk membantu kegiatan. Itu dari saya gitu. Tak akui itu memang ada. Cuman ada lah pemasukan tapi nggak sebesar yang dibayangkan orang *sakmene sakmene* itu enggak.”
(Wawancara dengan Pak Ngadiman, 29 April 2015)

Pernyataan yang serupa diutarakan oleh dua ketua RW yang ada di Lokalisasi Dolly-Jarak bahwa perputaran uang di lokalisasi juga membawa pengaruh kepada keuntungan keuangan RW. Sampai jajaran Muspika yang ada di

Kecamatan Sawahan juga ikut merasakan keuntungan yang didapatkan dari adanya lokalisasi. Sehingga bisa dikatakan bahwa apabila Lokalisasi Dolly-Jarak ditutup, maka aliran dana ke RW bahkan ke tingkat Muspika pun berhenti.

Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak membawa dampak kepada berkurangnya pemasukan ke RW. Menurut pernyataan dari informan di atas bahwa gaji yang diterima sebagai ketua RW dari pemerintah tidak cukup untuk memenuhi biaya operasional dan penggunaan kegiatan sosial warga masyarakat, sehingga ada pemasukan tambahan dengan adanya lokalisasi di RW tersebut. alasan penerimaan dana dari lokalisasi adalah karena tidak ada sumber pendapatan lainnya yang mampu dikelola menjadi kas RW itu sendiri. Keadaan masyarakat sekitar juga sama kekurangannya karena kebanyakan masyarakat menggantungkan pendapatan dari Lokalisasi Dolly-Jarak.

Pengelolaan pendapatan yang masuk ke RW kemudian didistribusikan kepada linmas lokalisasi yang bertugas untuk menjaga keamanan operasional tiap malamnya. Selain itu diberikan pada pihak aparat lain yang sewaktu-waktu datang untuk membantu pengamanan atau melaksanakan operasi di wilayah RW tersebut. Sisa dari total seluruh pemasukan ke lokalisasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan masyarakat seperti penuturan Ketua RW III berikut ini :

“Gini Mbak ya itu di RW dulu banyak keamanan kan. Misalnya linmas, linmas itu saya rekrut sekitar 25 untuk satu RW. Dari 25 ini ya terus bukan saya gaji, bukan. Itu kan kalo gaji bulanan ya. Bukan, itu dapat uang masuk itu dapat dari pengunjung itu sekitar katakanlah satu malamnya sekitar 900 sampai satu juta lah semalem. Satu juta ini untuk katakanlah untuk anggota linmas yang 20 orang ya katakanlah 50 satu orang, itu udah berapa belum *ngombe* (minum) nya ya kan itu *melek sewengi lohyo* (begadang). *Sampeyan lek gak gelem melek sewengi*

dibayar 50 loh, uang 50 sekarang itu kan kurang mencukupi lah. Lek 50 untuk hari ini loh, katakanlah kurang mencukupi kalo 50 belum makannya, rokoknya, dan sebagainya itu tak anggep rata-rata 20 orang itu 200, 700 ya belum yang lain-lainnya. Katakanlah ada pamong *dike'i* (diberi) rokok *dikei anu*, paling sisa ya untuk RW sekitar 190 sampai 200 lah. Itu semalam, itupun dibuat untuk kegiatan, makanya ya kalo diliat dadi RW Jarak iku enak duik tok, kalo nggak tau memang berbicara seperti itu. *Nek ngelakoni* baru tau.”
(Wawancara dengan Pak Tjukup, 29 April 2015)

Dari penjelasan di atas, maka kepentingan dari RW di Lokalisasi Dolly-Jarak adalah tidak setuju dengan adanya penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Walaupun secara pribadi diungkapkan bahwa mereka setuju dengan tindakan Pemerintah Kota Surabaya, tapi dibelakangnya diimbuhi hilangnya pemasukan dana kas ke dalam kantong RW. Selain itu walaupun RW di Kelurahan Putat Jaya sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai jembatan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan masyarakat di sekitar lokalisasi, namun kepentingan terbesarnya adalah hilangnya pendapat dari Lokalisasi Dolly-Jarak.

III.1.6. Perwakilan Ormas Islam

Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Kyai dan Ulama di Jawa Timur yang pernah mendatangi Walikota Surabaya meminta dan mendesak bahwa lokalisasai harus ditutup. Desakan ini datang dari 20 orang Kyai yang meminta seluruh lokalisasi di Surabaya ditutup tidak lama setelah Walikota Surabaya Tri Rismaharini menjabat. Alasan yang melatarbelakangi desakan tersebut adalah program penutupan lokalisasi di Jawa Timur merupakan program seluruh Kyai dan Ulama Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Timur seperti wawancara dengan Bapak Ernest berikut ini :

“Program penutupan lokalisasi khususnya Dolly itu di Jawa Timur ini bukan program pemerintah tapi program Kyai, Masayekh, Ulama NU seluruh Jawa Timur yang diikutkan pemerintah. “Jika sampeyan tidak melaksanakan ini, sampeyan sama dengan melawan Kyai, Ulama, Masayekh NU se-Jawa Timur” begitu. “Siap Kyai saya kerjakan”. Hehehe. Itu langsung digitukan. “Iya siap Kyai. Satu bulan lagi, dua bulan lagi saya siap pasang badan”.Ya sudah. Hehehe.”
(Wawancara dengan Bapak Ernest 23 Februari 2015)

Bapak Ernest merupakan orang yang diberikan amanah oleh KH. Mutawakkil Alallah selaku Ketua PWNU Jawa Timur untuk mengawal penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Berasal dari GP Anshor sebagai Kepala Protokoler Jawa Timur dan menjadi wakil di Surabaya. Di Kecamatan Sawahan, Bapak Ernest menjabat sebagai pembina. Pada saat persiapan penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak yang dilakukan oleh Tim Dakwah PBNU adalah bersama dengan tokoh agama melakukan kegiatan keagamaan di lokalisasi. Kegiatan tersebut bisa berupa pengajian dan siraman rohani kepada PSK, mucikari, maupun warga sekitar di lokalisasi.

Berdampingan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Kelurahan Putat Jaya dan pemberdayaan fisik yang dilakukan oleh beberapa pihak dinas lainnya, seperti pembinaan dan pelatihan keterampilan maka penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak disepakati harus ditutup. Karena melalui pendekatan rohani sudah dilakukan, pendekatan fisik sudah dilakukan, dan tidak ada alasan lain lagi untuk tidak menutup Lokalisasi Dolly-Jarak.

Tim PBNU bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya yaitu dengan Dinas Sosial Kota Surabaya untuk mengantisipasi gejala yang terjadi saat penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Gejala yang timbul bukan berasal dari penduduk asli di sekitar lokalisasi, melainkan dari pihak pengusaha maupun LSM

yang berusaha memprovokatori untuk menolak penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Karena memang tidak dipungkiri bahwa ada beberapa pihak yang berusaha untuk menunggangi dengan kepentingan-kepentingan tertentu.

Menurut keterangan Pak Ernest bahwa penduduk asli di sekitar lokalisasi menginginkan penutupan karena alasan dampak yang ditimbulkan dengan adanya lokalisasi mampu mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Dampak yang ditimbulkan antara lain penyebaran narkotika, penurunan moral anak-anak, dan banyak warga yang mengeluh karena selalu diminta uang keamanan oleh preman yang ada di lokalisasi. Namun masyarakat menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak sampai pada saat Pemerintah Kota Surabaya memberikan fasilitas deklarasi penutupan oleh masyarakat lokalisasi di Islamic Center.

Kegiatan yang dilakukan oleh tim dari PBNU tidak hanya pada persiapan penutupan, tapi terus mengawal hingga setelah penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya. Satu hal yang menjadi kelemahan dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak menurut Pak Ernest adalah tidak disiapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang kos-kosan yang ada di sekitar Lokalisasi Dolly-Jarak. Karena walaupun sudah resmi ditutup dengan adanya deklarasi pada tanggal 18 Juni 2014, ada beberapa PSK yang tidak pulang ke tempat asalnya tapi tinggal di kos-kosan. Memang hampir seluruh wisma sudah ditutup, namun model baru yang berkembang adalah PSK tersebut dipanggil apabila ada pesanan yang ingin dicarikan teman kencan. Hal ini sangat disayangkan oleh beberapa pihak.

“Nah gini, memang ada sebagian itu di luar. Tapi kalau buka ngga ada. Tapi cuma orang atau anak-anak itu mungkin kalau ada orang pesen itu dicarikan. Nggak ada itu. Jadi memang tak akui belum sepenuhnya bersih karena bagaimanapun kan kebutuhan mereka masih ada, karena kemarin yang saya tentang karena kemarin itu saya ngomong ke Pemerintah Kota, “tolong sebelum ditutup itu siapkan Perda dulu. Perda untuk mengatur tentang kos-kosan.” Jadi Perda penghuni kos-kosan. Jadi nanti jika ditutup itu sudah ada sekarang seperti ini. Semua pindah ke kos-kosan. Lalu tidak di lokalisasi. Tapi pindah di kampung sebelah-sebelah.”

(Wawancara dengan Bapak Ernest 23 Februari 2015)

Beberapa RW yang ada di Kelurahan Putat Jaya memang dibuka kos-kosan untuk alternatif perempuan PSK yang tidak pulang ke tempat asalnya. Sehingga dengan sembunyi-sembunyi ada saja yang masih beroperasi apabila ada yang memesan namun mereka kencan di luar lokalisasi. Tugas calo untuk menghubungkan antara pelanggan dengan perempuan PSK tadi. Hal ini sebenarnya bisa dicegah dengan melakukan operasi yustisi yang dilakukan oleh gabungan aparat keamanan. Namun menurut Pak Ernest, operasi yustisi tidak selamanya menjadi solusi yang pas apabila perempuan PSK tinggal di kos-kosan tanpa ada peraturan daerah mengenai kos-kosan di sekitar lokalisasi. Aparat dan RW pun mengambil tindakan juga agak sulit karena tidak ada dasar hukum yang jelas untuk mengatur kos-kosan.

Jadi apabila disimpulkan kepentingan Organisasi Agama Islam dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak adalah sebagai pihak yang mencetuskan untuk penutupan lokalisasi di Surabaya dan di Jawa Timur. Program itu kemudian diajukan kepada Walikota Surabaya dan disepakati melalui seruan bersama penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Kepentingan lainnya adalah untuk mengurangi prostitusi dengan menutup lokalisasi dengan menerjunkan tim dan orang-orang

kepercayaannya di lapangan melalui tim dakwah, tim pendampingan, dan tim pengamanan. Sehingga tujuan program penutupan Lokalisasi di Jawa Timur oleh Kyai dan Ulama bisa terlaksana.

III.1.7. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang berada di Lokalisasi Dolly-Jarak cukup memberikan pengaruh yang kuat terhadap PSK, mucikari, dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa LSM memang berfokus kepada kesehatan, kesejahteraan, dan sebagai tempat untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan tertentu. LSM yang memiliki *concern* atau pemusatan di kawasan Lokalisasi Dolly-Jarak antara lain Yayasan Abdi Asih, FKMLS (Forum Komunikasi Masyarakat Lokalisasi), FPL (Front Pekerja Lokalisasi), Pagarjati (Paguyuban Arek Jawa Timur), GRB (Gerakan Rakyat Bersatu), Yayasan Embun, KOPI, dan lainnya. Walaupun sama berdiri dengan tujuan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di luar struktur pemerintahan, namun tujuan dari LSM ini juga berbeda. Dalam hal penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak LSM-LSM ini juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda seperti yang diungkapkan oleh Pak Deddy berikut ini :

“LSM namanya FKMLS atau Forum Komunikasi Masyarakat Lokalisasi Surabaya itu ada. Kecenderungannya ya mendua dia. Mendua ya, di satu sisi memang mereka tahu itu perbuatan tidak dibenarkan. Di sisi lain, dia meng- apa namanya ya, jadi ya mengatasnamakan untuk melindungi mereka. Gitu loh. Daripada mereka berada dimana-mana tidak dikontrol maka lebih aman mereka ada di lokalisasi. Nah itu pembenaran. Seperti mereka menerapkan kegiatan pembenaran. Tapi dia mengaku bahwa itu perbuatan yang tidak benar. Menyalahi hukum dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka disuruh pulang, ini dan sebagainya dikuatirkan mereka akan berada

dimana-mana. Pembenaannya mereka begitu. Padahal mereka juga mendapatkan keuntungan disitu. Terus ada lagi Yayasan Abdi Asih.”

“Itu tidak mendukung. Mendukung, tetapi tidak pada apaya, artinya butuh waktu. Kalau ditanya butuh waktu itu kan relatif ya. Dia juga diuntungkan dengan adanya lokalisasi. Terus apalagi ya, oh FPL. Kalau FPL itu memang yang mempertahankan keberadaannya itu. Jadi FPL tuh Forum Penyelamat Lokalisasi. Jadi yang menghalang-halangi pemerintah itu.”

(Wawancara dengan Pak Deddy, 19 Maret 2015)

Ada kecenderungan yang berbeda dari beberapa LSM dalam menyikapi penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Kebanyakan memang menolak penutupan lokalisasi karena LSM sudah melekat dan fokus pada lokalisasi akhirnya harus ikut berjuang untuk menolak penutupan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Ada pula LSM yang menerima penutupan lokalisasi namun butuh waktu karena perempuan PSK sebagai korbannya harus diberikan pendidikan kemandirian dan keterampilan berwirausaha agar mampu mandiri setelah berhenti menjadi PSK.

Kepentingan dari LSM terlihat ketika penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak terjadi. Ada beberapa LSM yang dengan lantang menolak penutupan lokalisasi. Hingga akhirnya mereka memprovokatori para PSK dan mucikari untuk melakukan aksi turun ke jalan dengan menggunakan kaos berwarna hitam. Aksi turun ke jalan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak yang nantinya akan menghentikan ladang pekerjaan mereka di dalam lokalisasi. Aksi turun ke jalan ini dibarengi dengan aksi penutupan jalan di beberapa titik jalan masuk ke lokalisasi. Pemasangan spanduk bertuliskan penolakan terhadap penutupan lokalisasi juga terpampang di sepanjang jalan Girilaya, Raya Dukuh Kupang, Putat Jaya, dan Dukuh Kupang Timur. Aksi lebih

keras terlihat ketika Satpol PP mulai memasang plang penanda bahwa Kelurahan Putat Jaya bebas prostitusi seperti pada bab satu di atas, penolakan dilakukan dengan cara membakar ban dan sampai ada provokator dari LSM FPL yang diamankan oleh aparat kepolisian seperti penjelasan dari Pak Ernest dalam wawancara berikut ini :

“Saya ngomong waktu itu ada orang tiga yang menjadi provokator disini. Itu dimintakan ke saya “Pak itu tiga orang itu diambil juga beres”. Itu dari LSM. Karena satu memang dia makannya dari situ jadi karena nggak mau ditutupnya dia makannya dari situ. Jadi jatahnya dari situ. Nah terus yang satu sudah dientaskan waktu itu saya koordinasi dengan Pak Pomo kepala Dinas Sosial “Sudah Pak Ernest ini yang ini sudah. Kita turuti, kita akomodir untuk anaknya menjadi pegawai terus menantunya juga sudah”. Tapi ada satu anak itu berdua lah sebenarnya yang menjadi povokator. Kebetulan sudah masuk Polrestabes.”

(Wawancara dengan Bapak Ernest, 23 Februari 2015)

Beberapa provokator yang berasal dari LSM memang sudah menjadi target bagi Pemerintah Kota Surabaya. Dibantu oleh tim dibawah pengawasan dari PBNU dan aparat kepolisian, akhirnya provokator ini bisa diamankan dan proses pemasangan tanda jalan bisa dilaksanakan. Memang ada yang sudah ditangani oleh Dinas Sosial Kota Surabaya agar tidak lagi menjadi provokator dengan cara mengakomodir kebutuhannya.

Pada saat peneliti terjun ke lapangan, peneliti masuk ke Yayasan Abdi Asih yang merupakan LSM pertama sejak tahun 1992 di kawasan Lokalisasi Dolly-Jarak. Yayasan Abdi Asih yang diprakarsai oleh Bu Verra merupakan LSM yang fokus pada pembebasan perempuan PSK dari jerat para mucikari dengan cara mengadakan arisan PSK dan arisan mucikari. Selain itu Yayasan Abdi Asih juga secara berkelanjutan membantu para perempuan PSK yang ingin berhenti

menjadi PSK dengan jalan memberikan pelatihan-pelatihan seperti yang diungkapkan Bu Verra dalam wawancara berikut ini :

“Banyak temen-temen jadi PSK, pelacur, kamu *mbalon, mbalono*. Kalau mau pelatihan kesini. Karena aku ngga bisa kasih kehidupan buat dia. Itu aja. Keterampilan boleh. Itu yang kami lakukan disini sehingga mereka ada yang punya salon besar. Sampe di setiap salon banyak, sampe perusahaannya macem-macem banyak. Ratusan dari mereka yang sudah jadi dan mau. Kan setiap manusia itu kan keinginan. Berjuang atas dirinya bukan orang lain kan. Orang lain hanya memberikan dukungan. Tapi dia mau maju atau enggak kan tergantung dari individu orangnya. Sama dengan PSK. PSK pada umumnya tidak bisa baca tulis. Tidak ada kemauan dia untuk mengangkat harkatnya, dia sebagai perempuan tidak diinjak-injak oleh kaum lelaki disana.”

(Wawancara dengan Bu Verra, 11 April 2015)

Pelatihan yang dilakukan di Yayasan Abdi Asih meliputi pelatihan tata boga dan tata busana. Tata boga yakni dengan memasak dan membuat kue-kue kering dan basah yang kemudian dipasarkan melalui pesanan atau dititipkan di toko dan swalayan terdekat. Sedangkan untuk tata busana diajarkan keterampilan menjahit dan merancang busana. Hasil dari jahitan tersebut kemudian dipasarkan kepada kelompok masyarakat atau diperagakan di acara-acara tertentu. Pelatihan yang dilakukan oleh Yayasan Abdi Asih tidak dilakukan dalam hitungan hari atau minggu, melainkan dalam hitungan tahun. Perempuan PSK maupun perempuan yang positif mengidap HIV/AIDS bisa mengikuti pelatihan di Yayasan Abdi Asih dengan gratis tanpa pungutan biaya sedikitpun. Namun mereka harus benar-benar serius tidak akan kembali lagi masuk ke dunia prostitusi atau menjadi PSK lagi yang menjajakan tubuhnya kepada pelanggan.

Selain melakukan pelatihan, Yayasan Abdi Asih dalam sikapnya saat ini adalah fokus pada kesehatan para perempuan, anak-anak, ataupun orang yang

positif mengidap HIV/AIDS. Melalui wawancara dengan Bu Verra diketahui bahwa Yayasan Abdi Asih kini membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Rumah Sakit Dr. Soetomo sebagai *shelter* yang mampu menampung pasien HIV/AIDS. Apabila RS Dr. Soetomo sudah tidak bisa lagi menampung atau merawat pasien positif HIV/AIDS maka akan diserahkan kepada Yayasan Abdi Asih untuk merawat dan mengurusnya. Pasien-pasien ini dirawat di *shelter* Abdi Asih dengan harapan masih mendapatkan perawatan dan pengobatan.

Sama halnya dengan perempuan PSK yang mengidap HIV/AIDS atau yang memutuskan untuk berhenti menjadi PSK maka akan memilih Yayasan Abdi Asih sebagai tempat untuk melakukan pelatihan dan keterampilan. Bu Verra dan Yayasan Abdi Asih secara aktif menyuarakan bahwa perempuan PSK harus menjadi perempuan yang mandiri dan mampu mengangkat derajat dan mastabatnya agar tidak terus menerus dieksploitasi oleh mucikari maupun pihak yang berada di lokalisasi. Boleh saja perempuan bekerja menjadi PSK karena alasan ekonomi dan menginginkan pendapatan yang lebih. Namun hendaknya disertai pula dengan keinginan untuk keluar dari kegiatan prostitusi dan belajar mandiri.

Berkaitan dengan penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak, Bu Verra menyayangkan bahwa teman-teman LSM tidak diajak duduk bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya harusnya mengajak LSM yang benar-benar fokus terhadap permasalahan di Dolly-Jarak untuk mencari solusi bersama dan jalan keluar. Karena menurut Bu Verra

permasalahan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemberian uang pesangon dan pembinaan beberapa hari.

Akar masalah yang benar-benar diperhatikan adalah kemandirian perempuan PSK tersebut dan permintaan akan pelanggan yang terus menerus berdatangan. Sehingga harus ada waktu lebih untuk mempersiapkan penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak di Kota Surabaya agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan permasalahan baru.

III.2. Sikap Pemerintah Kota Surabaya dan Perempuan PSK dalam Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak di Kota Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya yang menjalankan program alih fungsi wisma dan alih profesi bagi PSK dan mucikari bekerja sama dengan jajaran yang ada di bawahnya untuk menyikapi penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Sebagai perwakilan dari negara yang menjalankan tugas dan fungsinya atas instruksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan desakan dari MUI di Jawa Timur, maka dilakukan penutupan seluruh lokalisasi di Surabaya dan khususnya bagi Lokalisasi Dolly-Jarak. Sebagai lokalisasi yang sudah memiliki nama besar baik di dalam dan di luar negeri, penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak mendapat sorotan utama selama kurun waktu di tahun 2014 dan 2015. Disejajarkan dengan Lokres Kramat Tunggak di Jakarta Utara dan Lokalisasi Saritem di Bandung, dapatkah Pemerintah Kota Surabaya menutup Lokalisasi Dolly-Jarak dengan memperhatikan dan menyelesaikan segala aspek yang ada di dalamnya ? Oleh

karena itu sikap dari Pemerintah Kota Surabaya selaku subyek atau pelaku dalam penutupan dan sikap Perempuan PSK sebagai obyek perlu diteliti lebih dalam.

Sikap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak diuraikan berdasarkan persiapan, penutupan, dan pasca penutupan. Karena dalam pelaksanaan di lapangan banyak aspek yang diperhatikan dan disentuh oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga tidak sedikit yang menimbulkan hambatan dan menuai pertentangan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak.

III.2.1. Sebelum Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak

Penutupan lokalisasi Dolly-Jarak bisa dikatakan membutuhkan waktu dan proses yang lumayan panjang. Dinas Sosial berdasarkan instruksi dari Walikota Surabaya mempersiapkan program kesejahteraan sosial berupa Program Penanganan Lokalisasi di Kota Surabaya melalui Kegiatan Alih Profesi WTS dan Alih Fungsi Wisma. Secara lebih khusus program ini bertujuan untuk alih fungsi wisma, alih profesi bagi WTS, Mucikari, dan Masyarakat yang terdampak dari penutupan lokalisasi. Untuk persiapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah pendataan seperti wawancara dengan Pak Deddy berikut :

“...Jadi begini, bukan seperti orang terus masuk ke kampung, terus semua lokalisasi ditutup, ditutup, ditutup gitu tidak seperti itu. Yang Dinsos lakukan yang pertama itu pasti pendataan. Pendataan itu apakah pendataan langsung atau pendataan tidak langsung. Langsung barangkali Dinsos karena memang jauh hari sebelumnya Dinsos itu sudah punya kegiatan rutin ya, tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial itu melakukan pembinaan baik keterampilan maupun pembinaan mental dan jiwa...”

(Wawancara dengan Pak Deddy, 13 Maret 2015)

Sebelum adanya wacana untuk penutupan lokalisasi di Surabaya khususnya Dolly-Jarak, Dinas Sosial sudah mempersiapkan pembinaan melalui kegiatan rutin seperti pembinaan keterampilan berupa pengajaran membuat, memasak, dan mengembangkan usaha ekonomi, selain itu juga pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan keagamaan, siraman rohani, maupun pengajian rutin sebagai wujud dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial dalam hal meningkatkan kesejahteraan sosial.

Ketika sudah dimunculkan wacana untuk penutupan lokalisasi di seluruh Jawa Timur, maka yang dilakukan Dinas Sosial untuk Lokalisasi Dolly-Jarak adalah pendataan jumlah WTS, Mucikari, wisma, dan potensi sosial yang ada di sekitar lokalisasi. Pendataan dilakukan agar Dinas Sosial mendapatkan jumlah pasti dan tidak berdasarkan asumsi saja. Karena jumlah ini kemudian terkait dengan tindak lanjut bantuan yang akan dipersiapkan oleh Pemkot Surabaya selanjutnya. Untuk mendata jumlah saja juga bukan hal mudah bagi Dinas Sosial, karena banyaknya hambatan yang dialami seperti kutipan wawancara Pak Deddy berikut ini :

“...Jadi setelah kita melakukan verifikasi, disitu kita ngga bisa jalan mulus. Banyak pertentangan, banyak dialog-dialog. Kemudian kita dilawan, dan sebagainya. Sehingga kami melakukan verifikasi itu secara tertutup. Jadi melalui pendekatan-pendekatan dengan tokoh-tokoh agama yang ada disana. Setelah melakukan verifikasi itu kemudian ya pastilah strateginya banyak. Tidak perlu disampaikan kalau strategi kan sifatnya teknis ya. Terus kemudian setelah itu semua kita dapatkan, coba kita koordinasi dengan provinsi, dengan pemerintah pusat. Nah Alhamdulillah semua itu siap. Jadi bersinergi dengan pemerintah Kota Surabaya. Bahwa untuk urusan WTS nya dari kementerian yang urus. Dari uangnya, pemulangannya, dan sebagainya. Untuk urusan mucikarinya itu gubernur yang urus (Gubernur Jawa Timur). Untuk urusan pasca penutupan itu Pemkot yang urus. Jadi untuk masyarakat terdampak itu begitu. Itu setelah itu kita susun juga

program dari satu tahun sebelumnya kita sudah melakukan persiapan-persiapan...”
(Wawancara dengan Pak Deddy, 13 Maret 2015)

Persiapan yang dilakukan Dinas Sosial tidak dalam hitungan hari, minggu, maupun bulan, melainkan persiapan dilakukan bertahun-tahun agar persiapan menjadi matang dan tepat sasaran program. Setelah melakukan pendataan dan pendekatan yang mengalami beberapa hambatan kecil, Dinas Sosial pun melakukan sinkronisasi program dengan berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait. Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membantu Pemerintah Kota Surabaya dengan dibantu pihak-pihak lainnya untuk mempersiapkan segala kebutuhan dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak.

Setelah adanya rapat koordinasi tersebut didapatkan bahwa Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk masalah PSK dengan memberikan dana stimulan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab untuk masalah mucikarinya atau dalam bahasa pemerintah disebut sebagai Keluarga Rentan, sedangkan untuk persiapan pelaksanaan teknis keseluruhan sampai pada pasca penutupan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya.

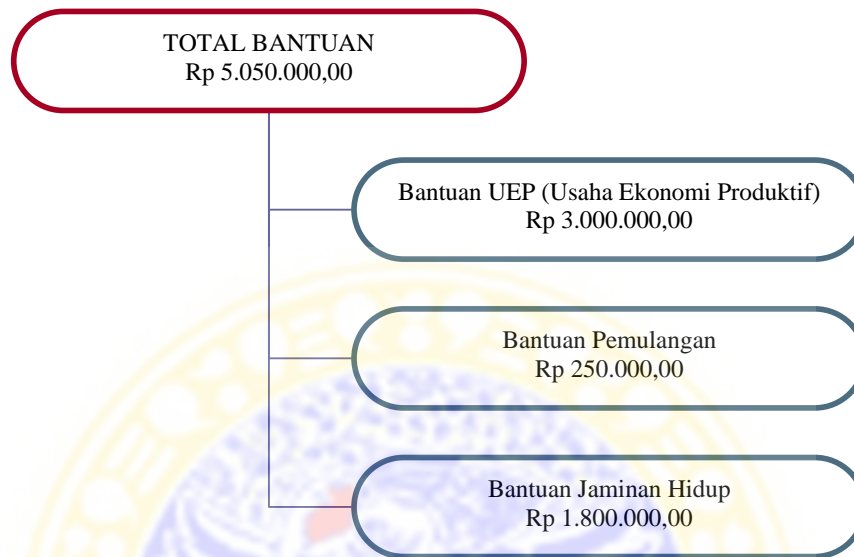
Tabel III.1
Pihak dan Peran dalam Program Penanganan Lokalisasi di Kota Surabaya
Melalui Kegiatan Alih Profesi WTS dan Alih Fungsi Wisma

PIHAK	PERAN
KEMENTERIAN SOSIAL	Memberikan bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif), jaminan hidup selama 3 bulan, dan biaya pemulangan WTS ke daerah asal.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR	Memberikan bantuan sosial kepada mucikari (keluarga rentan).
PEMERINTAH KOTA SURABAYA	Penertiban terpadu. Pembinaan mental kepada WTS dan mucikari. Pelatihan keterampilan bagi WTS, mucikari, dan masyarakat terdampak. Pembentukan dan pembinaan KUBE (Kelompok Usaha Bersama)
STAKE HOLDER LAINNYA (DPRD, TNI, POLRI, LKS, ORMAS, Organisasi Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lainnya)	Membantu mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penanganan di Lokalisasi Dolly-Jarak

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya tanggal 19 Maret 2015, dan diolah

Setelah pihak-pihak di atas berkoordinasi, maka rencana dan persiapan yang dilakukan selanjutnya adalah dana stimulan yang akan diberikan kepada PSK dan mucikari. Menurut informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui Pak Indra, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial bahwa dana yang diberikan sebesar Rp 5.050.000,00 dengan rincian untuk Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, Bantuan Pemulangan, dan Bantuan Jaminan Hidup.

Bagan III.3
Rincian Pemberian Bantuan Dana Stimulan Kepada PSK dan Mucikari



Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya tanggal 19 Maret 2015, dan diolah

Selain persiapan yang dilakukan berupa koordinasi, anggaran, dan kerjasama antara pihak terkait, Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Sosial juga mempersiapkan peraturan dan dasar hukum dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Maksud dan tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali bahwa apabila suatu saat ada yang melanggar dan masih membuka praktek prostitusi di Dolly, maka akan dikenai jerat hukum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pak Deddy dalam wawancaranya juga membernarkan mengenai hukum yang akan dikenakan apabila melanggar.

“...Kemudian kalau KUHP pasal 296 dan pasal 506. Terus kemudian Undang-Undang 21 tahun 2007. Terus Perda nomor 7 tahun 1999...”

Bab sebelumnya sudah menjelaskan mengenai dasar hukum yang digunakan dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak di Kota Surabaya. Selain

KUHP dan undang-undang tersebut, seruan bersama dari beberapa pihak juga dikeluarkan sebagai bentuk dukungan untuk menutup Lokalisasi Dolly-Jarak. Ada pihak Ormas Islam, perwakilan MUI dan NU, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. KUHP pasal 296 dan pasal 506 selalu digunakan sebagai landasan di kawasan prostitusi. Namun sebenarnya apabila dilihat kembali dua pasal dalam KUHP ini hanya mampu menjerat mucikari, geromo, atau penyedia jasa PSK, tanpa memperhatikan pihak lain di sekitar PSK dan bahkan pengguna jasa PSK nya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ditengarai bahwa di dalam lokalisasi seringkali berlangsung perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 adalah tentang Larangan Mendirikan Bangunan/Tempat untuk Pembuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Pembuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Peraturan ini ditujukan untuk bangunan wisma-wisma yang ada di lokalisasi dan digunakan untuk aktifitas prostitusi. Harapannya dengan diberlakukan peraturan ini, pemerintah bisa melaksanakan alih fungsi lokalisasi agar mampu mengembalikan fungsi wisma-wisma menjadi rumah tangga atau usaha non-prostitusi.

III.2.2. Saat Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak

Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak pada tanggal 18 Juni 2014 merupakan momentum bahwa lokalisasi terbesar di Jawa Timur telah ditutup dan sudah tidak beroperasi lagi. Penutupan lokalisasi dalam bahasa yang diutarakan

oleh Pemerintah Kota Surabaya merupakan alih fungsi wisma dan alih profesi bagi PSK dan mucikari. Sebelum hari penutupan, banyak LSM dan ormas yang sudah memprovokasi para PSK dan mucikari agar menolak penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Mereka pun menyebarkan isu bahwa lokalisasi tersebut tidak akan ditutup karena setelah Hari Raya Idul Fitri akan beroperasi kembali. Menurut Pak Indra yang saat itu memantau keadaan lapangan dan mengambil dokumentasi, bahwa ada aksi menutup jalan di beberapa titik sekitar lokalisasi.

Dilaksanakan di Islamic Center yakni dengan pengajian akbar dan deklarasi dari pihak-pihak yang menginginkan penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jajaran pemerintahan. Hadir pada hari itu yakni Menteri Sosial Republik Indonesia Salim Segaf Al Jufri, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Syaifullah Yusuf, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Kapolda Jatim dan Kapolrestabes Surabaya, Komandan Korem Bhaskara Jaya, Kepala Staf Garnisun Tetap III Surabaya, Ketua DPRD Surabaya, seluruh jajaran Formipda (Forum Pimpinan Daerah), Muspida dan Muspika, beberapa tokoh agama, masyarakat Kelurahan Putat Jaya, serta perwakilan PSK dan mucikari.

Momentum itu digunakan sebagai bentuk deklarasi dari masyarakat bahwa Lokalisasi Dolly-Jarak telah ditutup oleh masyarakat setempat seperti yang disampaikan oleh dua informan dalam wawancara berikut ini.

“...Kemudian acara-acara kegiatan penutupan itu sebetulnya bukan kemudian ditutup gitu oleh Pemkot tuh bukan, acaranya adalah pengajian akbar dan deklarasi. Pembacaan deklarasi. Deklarasi itu isinya bahwa dibacakan oleh tokoh masyarakat ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, semua ada disitu membacakan isi deklarasi bahwa di wilayah Kelurahan Putat Jaya

mereka tidak lagi menginginkan adanya lokalisasi, prostitusi. Ia ingin hidup damai, hidup normal, seperti daerah-daerah yang lain. Kira-kira itulah gambarannya. Sehingga dengan demikian disaksikan oleh semua, oleh menteri pada waktu itu (Menteri Sosial), semua Muspida, provinsi, dan Muspida kota, Muspika, dan sebagainya termasuk Ibu Wali Kota. Sehingga disitu adalah momentum bahwa lokalisasi secara formal sudah ditutup oleh masyarakat.”
(Wawancara dengan Pak Deddy, 13 Maret 2015)

“...Nah setelah itu baru tahun 2014 kita dengan penutupan itu, penutupan itu juga kemauan warga masyarakat sini. Pemerintah kota itu hanya mendorong karena permintaan warga masyarakat. Pemerintah kota ikut mendorong membantu warga masyarakat yang memang benar-benar menginginkan kampung Putat Jaya ini bersih dari hal-hal yang terjadi seperti itu.”
(Wawancara dengan Pak Bambang, 14 April 2015)

Deklarasi tersebut diberi nama Deklarasi Warga Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan untuk Alih Fungsi Wisma dan Alih Profesi bagi Wanita Harapan Sekaligus Pemberian Bantuan Secara Simbolis dari Kementerian Sosial. Dengan ditandainya deklarasi ini maka diharapkan Lokalisasi Dolly-Jarak sudah tidak beroperasi lagi. Menurut Pak Indra dari Dinas Sosial, saat itu Pemerintah Kota hanya memfasilitasi deklarasi, sedangkan yang menjadi deklarator adalah masyarakat. Lebih banyak masyarakat yang menonton untuk deklarasi tersebut di Islamic Center. Saat deklarasi tersebut memang sudah ada antisipasi dari Pemerintah Kota Surabaya dan pihak keamanan dari kepolisian apabila terjadi bentrokan, namun tidak terjadi apa-apa di luar gedung.

Gambar III.1
Suasana Deklarasi Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak



Sumber : Dokumentasi Dinas Sosial Kota Surabaya dan website Trbunnews.com

Empat poin utama (Hakim, 2014:252) yang diutarakan dalam deklarasi tersebut antara lain warga menyetujui kawasan Putat Jaya bebas prostitusi, alih profesi di bidang lain yang sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan, mendukung penindakan tegas terhadap pelaku *trafficking* atau perdagangan orang, serta siap membangun kawasan Putat Jaya menjadi daerah yang lebih aman, maju, dan makin baik dengan bimbingan pemerintah.

Beberapa hari sebelum deklarasi memang terjadi penolakan dari berbagai pihak yang tidak setuju dengan adanya penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Beberapa LSM yang menolak dan berunjuk rasa antara lain seperti FPL (Front Pekerja Lokalisasi), GRB (Gerakan Rakyat Bersatu), FKMLS (Forum Komunikasi Masyarakat Lokalisasi Surabaya), dan beberapa LSM lainnya. Kecenderungan LSM ini kemudian menjadi motor untuk menarik PSK, mucikari, makelar, preman, dan warga yang menolak penutupan beraksi dan bereaksi di jalan mengenakan kaos berwarna hitam dan berhadap-hadapan dengan aparat

keamanan yang pada saat itu menjaga jalannya deklarasi di dalam Gedung Islamic Center.

Gambar III.2
Suasana Penolakan Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak



Sumber : Diunduh dari www.img.lensaindonesia.com pada 5 Maret 2015

Ternyata puncak kericuhan tidak terjadi pada hari penutupan lokalisasi, melainkan pada saat pemasangan papan nama peringatan oleh Satpol PP Kota Surabaya. Pak Indra menceritakan bahwa pemicu kericuhan tersebut adalah pihak yang masih tidak setuju dengan penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak kemudian bersatu dan melawan aparat keamanan. Ada preman-preman yang disewa oleh mucikari dan LSM-LSM yang masih tidak setuju. Mereka menilai bahwa momennya pas karena pada saat itu ada aksi bakar ban dan pelemparan.

Aparat keamanan memang telat masuk ke lokalisasi sehingga aksi anarkis tersebut langsung ditangani aparat. Perlawanan dan tindak anarkis itu langsung diproses hukum, para provokator dari LSM dan preman langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Apabila tidak ada momentum penolakan dan aksi anarkis tersebut mungkin sampai sekarang masih ada gejolak di

Lokalisasi Dolly-Jarak. Kurang lebih 9 orang diamankan termasuk provokator utamanya merupakan orang yang sudah terkenal di Surabaya dengan inisial nama asli AS.

III.2.3. Setelah Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak

Pasca penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak memang sudah dipersiapkan beberapa program untuk keberlanjutan dari Pemerintah Kota Surabaya. Beberapa program tersebut pada awalnya masuk dengan kawalan Dinas Sosial Kota Surabaya pada saat persiapan atau sebelum penutupan. Namun tidak semua berjalan dengan baik, ada yang menentang karena kepentingan beberapa pihak tidak setuju dengan penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Setelah momentum penutupan itu akhirnya program yang dicanangkan bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial seperti yang diungkapkan oleh Pak Deddy dalam kutipan wawancara berikut ini :

“...Dari semua komunitas yang ada disitu. Komunitas itu kan banyak. Orang yang berkepentingan disitu. RT, RW, terus orang-orang yang berdagang disana. Terus Linmas Lokalisasi, semua menentang, semua menghambat, semua program yang masuk ditutup. Sehingga rencana-rencana kegiatan program yang diinginkan nanti begitu ditutup, mereka itu sudah siap dengan kondisi yang ada itu. Akhirnya kan jadi tidak jalan normal dan maksimal ya. Yang semestinya begitu ditutup mereka sudah selesai, tapi tidak seperti itu. Setelah ditutup barulah kita melakukan”

(Wawancara dengan Pak Deddy, 13 Maret 2015)

Tepat sehari setelah penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak, bantuan yang disiapkan oleh Kementrian Sosial kepada PSK dan mucikari disalurkan. Berdasarkan data yang diverifikasi oleh Dinas Sosial pada saat persiapan penutupan lokalisasi, PSK dan mucikari yang terdaftar berhak untuk mengambil

bantuan dana stimulan sebesar Rp 5.050.000,00 tersebut. Menurut Pak Indra dari Dinas Sosial, bahwa ada kurang lebih 3 tahapan pengambilan dana stimulan yang diambil di Koramil dekat Lokalisasi Dolly-Jarak.

Tahap pengambilan pertama hanya 10% dari jumlah total penerima bantuan yang mengambil. Tahap pengambilan kedua dilaksanakan juga masih gagal karena banyak intervensi dan ancaman untuk tidak mengambil dana stimulan tersebut. Dan di tahap ketiga baru 630 orang yang mengambil bantuan dana stimulan. Khusus untuk pembagian dana stimulan di Lokalisasi Dolly-Jarak tidak berupa uang tunai sejumlah Rp 5.050.000,00 namun berupa tabungan yang dibantu berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Bank Jatim.

Tujuan dengan pembagian dalam bentuk tabungan adalah jika dibagikan dengan menggunakan uang tunai akan sangat rentan dari orang atau pihak yang memberikan ancaman kepada para PSK ini. Ada kecamasan bahwa dengan uang tunai akan langsung diminta atau diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga alternatifnya adalah dengan membukakan rekening di Bank Jatim dan dapat diambil kapan saja di Gerai ATM Bank Jatim dimanapun.

Gambar III.3
Pembagian Dana Stimulan Kemensos bagi Perempuan PSK di Dolly-Jarak



Sumber : Dokumentasi Dinas Sosial, diperoleh 19 Maret 2015

Dari jumlah total 1500an PSK yang sudah terdaftar, dan melalui beberapa tahapan waktu pengambilan dana stimulan seperti yang sudah dijelaskan di atas hanya sekitar 630 orang PSK dan 66 mucikari yang mengambil dana tersebut seperti wawancara dengan Pak Deddy berikut ini:

“...Setelah itu satu hari berikutnya bantuan-bantuan yang disiapkan oleh Kementerian Sosial diluncurkan. Diluncurkan, sudah diumumkan semua tetapi apakah guna tidak semua WTS itu mau mengambil. Dari 1500 sekian terakhir beberapa kali tahapan yang kami lakukan itu itu baru 630an. Setelah itu kita tunggu dan lain sebagainya kita berikan tenggat waktu sudah tidak ada maka ini kita kembalikan lagi ke Kementerian Sosial.”

(Wawancara dengan Pak Deddy, 13 Maret 2015)

Penyaluran bantuan stimulan juga tidak mulus dan lancar. Apa yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya seperti terus dihambat dengan adanya intervensi dari beberapa pihak yang tidak setuju dengan penutupan lokalisasi. Hambatan tersebut berupa ajakan untuk tidak mengambil dana stimulan dari Kementerian Sosial melalui Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan data

jumlah yang dikeluarkan Dinas Sosial Kota Surabaya ada total 1500 yang terdaftar, namun baru 630an atau dengan rincian 630 PSK dan 66 mucikari yang mengambil, berarti masih tersisa 804 orang yang belum mengambil. Intervensi dan provokasi disebarakan kepada PSK dan mucikari agar tidak mengambil dana tersebut, padahal mengambil atau tidak, lokalisasi tetap ditutup seperti yang diungkapkan oleh Pak Deddy dalam kutipan wawancara berikut ini:

“...Dia masih beranggapan bahwa dengan tidak menerimanya bantuan itu maka lokalisasi tidak jadi ditutup. Iya anggapannya seperti itu. Padahal dia lupa kalau momen deklarasi itu menjadi titik tonggak sejarah penutupan lokalisasi...”
(Wawancara dengan Pak Deddy, 13 Maret 2015)

Setelah penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak, Pemerintah Kota Surabaya kemudian melakukan tindakan-tindakan pasca penutupan yang sebelumnya sudah direncanakan. Pemulangan para PSK ke daerah asal juga diharapkan mampu menanggulangi perkembangan prostitusi kembali di wilayah lokalisasi. Namun tidak ada jaminan pasti bahwa mereka yang dipulangkan kemudian tidak kembali lagi ke Surabaya. Sebenarnya Pemerintah Kota Surabaya juga tidak melarang bahwa mereka tetap bekerja di Surabaya, namun bekerja tidak menjadi PSK namun mereka beralih profesi untuk menjalankan pekerjaan yang normal dan tidak lagi berhubungan langsung dengan dunia prostitusi seperti yang diungkapkan Pak Deddy dalam kutipan wawancara berikut ini :

“Dari 1500 itu yang ber-KTP Surabaya itu cuma 40. Jadi setelah kita rapatkan bisa dikatakan PSK itu bukan warga Surabaya. Artinya ke depan kita akan melakukan apa namanya pendekatan ke mereka. Harapannya mereka sudah kembali lagi ke daerah. Apabila mereka warga Surabaya harapannya mereka sudah bisa melakukan aktivitas normal. Terus kemudian yang kedua, memang yang disentuh Surabaya itu ya masyarakat terdampak. PSK nya ini kan sudah dikasi duit. Yang tidak dikasih duit ya sudah salahnya sendiri kenapa tidak diambil.

Katanya ada intimidasi dan sebagainya itu urusan mereka. Kita tidak mungkin sih memaksa mereka untuk kembali ke daerahnya. Padahal mereka ke tempat ini (Lokalisasi Dolly) kan ingin mencari kerja misalkan. Mendeportasi warganya sendiri ya kan ngga mungkin. Jadi biarlah mereka hidup di Surabaya tetapi melakukan aktivitas normal...”

(Wawancara dengan Pak Deddy, 19 Maret 2015)

Sikap dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya atau Dinas Sosial adalah melakukan rehabilitasi sosial dan lingkungan pasca penutupan lokalisasi. Ada beberapa sasaran yang ditujukan antara lain dari segi Sumber Daya Manusianya bahwa pemberdayaan PSK, mucikari, dan masyarakat terdampak melalui pelatihan keterampilan yang diadakan oleh Pemkot Surabaya yang bekerja sama dengan beberapa pihak instansi formal maupun perusahaan. Seperti contohnya dengan Pelindo, Bapemas, YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah), perusahaan sepatu Ardiles, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan lainnya. Keterampilan tersebut berupa pelatihan membuat kerajinan tangan, tata boga, kecantikan atau salon, sentra usaha ekonomi, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam pengembangan usaha sehingga masyarakat memiliki sumber penghidupan dari kegiatan tersebut seperti yang diutarakan oleh Pak Deddy dalam kutipan wawancara berikut ini :

“...sekarang sudah beberapa kali kita melakukan apa namanya, pemberdayaan dan kemudian yang kedua merekrut beberapa tenaga Linmas disana untuk menjadi tenaga *outsourcing* di kantor. Jadi seperti itu. Sekarang sedang dilakukan terus menerus secara bersama-sama dengan *stakeholder* yang lain termasuk yayasan-yayasan, lembaga sosial, kemudian dari lembaga-lembaga perusahaan, seperti Pelindo, YDSF misalnya itu secara bahu-membahu melakukan pemberdayaan bantuan-bantuan kepada lokalisasi yang ada di Dolly-Jarak. Termasuk Pemkot juga membeli beberapa wisma disana dengan tujuannya

sebagai kemakmuran mereka, masyarakat mereka sendiri. Ada sentra-sentra usaha, ada kegiatan-kegiatan sosial, dan sebagainya. Jadi disitu ada bangunan yang paling besar, namanya Wisma Barbara lantai enam itu sudah dibeli oleh Pemkot dan sekarang sedang dilakukan kegiatan pelatihan dari Kementerian Perindustrian itu membantu melakukan pelatihan sekaligus pemberian pemasaran, merakit membuat sepatu. Haknya sepatu itu standarnya seperti apa kemudian diberi job gituya kemudian diberi job, dikerjakan oleh mereka.”
(Wawancara dengan Pak Deddy, 13 Maret 2015)

Sasaran yang ditujukan juga tidak hanya pemberdayaan dan pembinaan melainkan ada perekrutan tenaga *outsourcing* ke kantor-kantor pemerintahan dari orang-orang di Lokalisasi Dolly-Jarak. Contohnya adalah Linmas Lokalisasi. Pernyataan Pak Deddy di atas diperkuat oleh pernyataan dalam kutipan wawancara dengan Pak Ina berikut ini :

“...di Dinas Sosial sendiri sudah ada perekrutan tenaga kerja yang masih potensial sesuai kemampuannya sebanyak 24 orang yang kita ambil dari Linmas Lokalisasi Dolly-Jarak...”
(Wawancara dengan Pak Indra, 11 Maret 2015)

Selain pemberdayaan dalam hal Sumber Daya Manusia, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan penataan atau pengembalian fungsi kawasan melalui program alih fungsi wisma menjadi pemukiman serta pusat kegiatan masyarakat dengan harapan dapat mengurangi kegiatan prostitusi di kawasan pemukiman. Beberapa wisma yang sudah tidak digunakan dapat dijual kepada Pemerintah Kota Surabaya dan akan dibeli sesuai kesepakatan antara pemilik wisma dengan Pemerintah Kota Surabaya. Dari pengamatan peneliti memang Gang Dolly kini menjadi kota mati karena beberapa bangunannya dibiarkan *mangkrak* karena belum ada kejelasan dari pemilik wisma yang belum menjual kepada pihak Pemkot atau dialihfungsikan.

Gambar III.4
Kondisi Gang Dolly Setelah Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak



Sumber : Hasil Observasi Peneliti pada Tanggal 29 April 2015

Gang Dolly yang seperti kota mati ini dahulu memiliki 52 wisma di sepanjang gang ini. Namun karena Lokalisasi Dolly-Jarak ditutup pada tanggal 18 Juni 2014, maka Gang Dolly kini sepi dan tidak lagi hingar bingar. Peneliti meyusuri Gang Dolly dan Lokalisasi Jarak pada 8 bulan setelah ditutup, yakni Bulan Februari 2015, namun baru bisa mengambil gambarnya dua bulan setelahnya pada April 2015. Kondisinya masih sama. Sudah tidak ada plang penanda wisma dan parkir cinta. Tidak ada lagi logo-logo minuman keras di tiap wisma tersebut. Kondisi wisma yang sudah dibeli oleh Pemerintah Kota Surabaya dipasangi papan tanda “Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya” sebagai bentuk kepemilikan aset oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Gambar III.5
Wisma Barbara yang Terbesar di Gang Dolly dan Sudah Dibeli Pemerintah Kota Surabaya sebagai Sentra Usaha



Sumber : Hasil Observasi Peneliti pada Tanggal 29 April 2015

Ada salah satu wisma yang paling besar di Gang Dolly, yakni Wisma Barbara berlantai enam dan memiliki eskalator di dalamnya sudah dibeli oleh Pemerintah Kota Surabaya. Menurut Pak Indra, salah satu strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam menyikapi pasca penutupan adalah dengan membeli wisma-wisma dan rumah yang sudah tidak digunakan lagi sebagai tempat prostitusi. Wisma Barbara yang memiliki kurang lebih 100 kamar sudah dibeli Pemerintah Kota Surabaya dengan kisaran harga 9-10 Miliar Rupiah. Harapannya adalah bisa dimanfaatkan masyarakat di sekitar lokalisasi dengan baik dan benar setelah wisma tersebut direnovasi. Skat-skat kamarnya dihilangkan, tempatnya *disetting* luas dan rapi, listrik dan air berfungsi secara baik, dan ada penjagaan pengamanan di bekas wisma tersebut.

Pak Indra menjelaskan bahwa di bekas Wisma Barbara digunakan sebagai tempat pembuatan *upper* dan hak sepatu yang kemudian hasilnya diberikan kepada produsen sepatu Ardiles. Awal mulanya sebanyak 30 keluarga rentan atau mucikari diberikan pelatihan *upper* sepatu dari Tanggulangin yang kemudian dibekali oleh mesin jahit perorang. Setelah mendapatkan pelatihan, mereka kemudian mengajarkan pada PSK yang beralih profesi dan masyarakat terdampak yang ingin bergabung dalam sentra usaha tersebut. Bahan baku sudah dipasok dan mereka tinggal menjahit *upper* sepatu tersebut dengan upah Rp 6.000,00/pasang.

Sentra usaha ini tidak langsung berjalan lancar, menurut Pak Indra hambatan yang terjadi adalah banyaknya retur atau pengembalian hasil jahitan karena belum ahli dan belum rapi. Jumlah pemasukan pun berkurang dan kelompok usaha sepatu tersebut tinggal 19 orang. Ternyata hambatan lainnya adalah kurangnya pengawasan dari *manager* dan instruktur. Pemerintah Kota Surabaya ahirnya membantu dengan mencari orang yang kompeten agar selalu bisa memotifasi teman-teman penjahit sepatu untuk kembali dalam usaha dengan potensi tinggi tersebut. Bantuan tersebut juga diberikan Pemerintah Kota Surabaya melalui Kelurahan Putat Jaya untuk kendaraan dan pengantaran bahan baku, agar permintaan dari produsen sepatu selalu bisa dipenuhi sesuai target dengan baik. Hingga saat ini mereka sudah memenuhi keinginan produsen sebanyak 3.000 pasang tiap bulannya.

Menggali potensi ekonomi dan potensi yang dimiliki oleh seluruh warga masyarakat di sekitar lokalisasi memang dibutuhkan agar mereka bisa

hidup mandiri. Sehingga dengan pengembangan dan kebangkitan ekonomi pun harus menjadi kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat di sekitar lokalisasi. Butuh waktu dan proses yang tidak sebentar agar kegiatan ekonomi bisa terus dilakukan agar tercapai sasaran-sasaran untuk melakukan alih profesi sesuai dengan keahliannya.

“...Sekarang bagaimana kita membangkitkan ekonomi warga masyarakat sekarang ini dan tempat terpuruk itu menjadi seperti sedia kala. Memang harus bertahap kan bertahap, tidak mungkin sekali langsung Blar kembali lagi kan tidak mungkin. Kita harus bertahap dan itu juga tergantung dari warga masyarakat sendiri.”
(Wawancara dengan Pak Bambang, 14 April 2015)

Usaha untuk menghilangkan kawasan lokalisasi atau kegiatan prostitusi di lingkungan pemukiman adalah dengan meningkatkan keaktifan sosial kemasyarakatan dengan mengadakan kegiatan pelatihan dan ekonomi. Peningkatan keimanan dengan kegiatan keagamaan dan peningkatan pelatihan kepada mantan PSK dan masyarakat terdampak menjadi tujuan utama yang terus selalu dilaksanakan sebagai janji dari Pemerintah Kota Surabaya.

Gambar III.6 Pelatihan Batik di Kelurahan Putat Jaya



Sumber : Hasil Observasi Peneliti pada Tanggal 6 Maret 2015

Pelatihan yang diberikan kepada PSK dan masyarakat terdampak biasanya dikoordinir melalui Kelurahan Putat Jaya. Pada saat itu peneliti berkesempatan untuk melihat bagaimana pelatihan membuat di Kelurahan Putat Jaya yang diikuti oleh ibu-ibu dari satu RW. Biasanya pelatihan yang dilakukan oleh ibu-ibu hanya beberapa hari dilakukan tergantung kepada pihak penyelenggara kerjasama yang sebelumnya disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dan dilaksanakan oleh Kelurahan Putat Jaya. Pelatihan yang diberikan juga bermacam-macam. Tata boga biasanya pelatihan untuk membuat kue kering, kue basah, bandeng presto, dan telur asin. Tata busana biasanya diberikan berupa menjahit, membuat, dan merajut. Sedangkan pelatihan lainnya adalah pembuatan kerajinan tangan dari limbah bekas, pelatihan otomotif, dan pembuatan kerajinan tangan lainnya yang diharapkan mampu mengembangkan sentra ekonomi rumah tangga dan kelas menengah.

Keberlanjutan kerja sama dengan beberapa pihak sangat membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan setelah dampak penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Menurut Pak Indra selaku Kepala Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial bahwa kerjasama dilakukan dengan bantuan BUMN lainnya, Peti Kemas, Dinas Koperasi, dan kerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Salah satu yang bisa dijelaskan adalah pembentukan KUBE atau Kelompok Usaha Bersama yang ditujukan kepada perempuan PSK yang ingin beralih profesi dan kepada masyarakat terdampak di sekitar Lokalisasi Dolly-Jarak.

KUBE merupakan sebuah kelompok kecil berjumlah 10 orang yang program dan usahanya sesuai dengan yang terdaftar dalam Kementerian Sosial Republik Indonesia. Satu kelompok KUBE ini kemudian berkumpul dan mengajukan proposal ke Kementerian Sosial melalui Pemerintah Kota Surabaya untuk meminta dana bantuan. Mereka kemudian merekrut orang-orang disekitarnya untuk mulai berusaha. Apabila usaha mereka sesuai dengan program Kementerian Sosial, maka akan disalurkan bantuan dana sebesar 30 juta rupiah untuk bantuan usaha perkelompok. Langkah ini merupakan salah satu cara Pemerintah Kota Surabaya menyikapi penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Karena sebelumnya telah berhasil di Lokalisasi Bangunsari dan telah terbentuk sekitar 20 KUBE.

Selain upaya dalam rehabilitasi sosial dan lingkungan setelah penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan operasi yustisi berkala dengan melakukan razia dan penyusuran di daerah bekas wisma dan lokalisasi, hotel-hotel disekitar Lokalisasi Dolly-Jarak juga terkena razia. Menurut Pak Indra apabila masih ditemukan PSK yang masih beroperasi, maka akan langsung dikirimkan ke rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Kabupaten Kediri. Karena apabila PSK yang berada di luar Surabaya, biasanya koordinasi dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Senada dengan yang diungkapkan Pak Indra, Pak Deddy dan Pak Bambang juga mengatakan bahwa pengawasan memang diperlukan setelah penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak berikut.

“...Sehingga Pemerintah Kota memperkuat pada pengawasan dengan beberapa jajaran samping. Kepolisian, TNI, Satpol PP, itu selalu

melakukan pengawasan disana. Razia-razia tidak hanya di wilayah lokalisasi, tapi di café-café, di karaoke, di tempat-tempat hiburan, di hotel, dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya disitu.”

“Iya itu untuk pasca penutupan. Memperkuat pengawasan, memberdayakan mereka, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, dan kaya di Sememi, di Klakahrejo itu kan dibangun gedung olahraga, supaya disitu bisa diberlakukan.”
(Wawancara dengan Pak Deddy, 19 Maret 2015)

“Memang benar kata mereka pulang. Pulang juga kemungkinan kembali lagi kita juga tidak tahu dan memang kemungkinan juga mereka masih kos. Kemungkinan seperti itu juga ada. Nahantisipasi kita untuk mengatasi seperti itu kita mengadakan yustisi disana. Apabila ditemukan di kos-kosan itu memang PSK ex Jarak dan Dolly, ya kita bawa.”
(Wawancara dengan Pak Bambang, 14 April 2015)

Saat ini yang dibutuhkan setelah penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak adalah pengawasan yang lebih ketat terhadap prostitusi, menyiapkan rencana tindak lanjut nyata dari Pemerintah Kota Surabaya, dan apabila rencana pembangunan juga segera dilaksanakan. Supaya perubahan dan dampak dari penutupan lokalisasi dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitar lokalisasi.

Pemerintah Kota Surabaya dalam Hakim (2014:103) memprogramkan pembangunan prioritas terhadap 12 wilayah yang kemudian disebut sebagai Unit Pengembangan atau UP. Dolly sebagai bagian dari Kecamatan Sawahan juga menjadi salah satu dari 12 UP yang mendapatkan prioritas lebih dari Pemerintah Kota Surabaya. Kawasan Dolly ini akan dijadikan pusat bisnis dan perdagangan. Rencananya Jalan Putat Jaya akan dilebarkan sekitar 25 meter dengan tujuan kemudahan akses transportasi dan mampu dijadikan sebagai kawasan bisnis.

Pembenahan fasilitas penerangan dan saluran air akan dilakukan guna memperlancar kegiatan rencana pengembangan. Pemerintah Kota Surabaya menggunakan modal awal sebesar Rp 5 miliar untuk membeli wisma yang ada di kawasan Dolly-Jarak dan kemudian dibangun fasilitas umum seperti fasilitas olahraga, taman, perpustakaan, dan fasilitas lainnya.

III.3. Perempuan PSK Diantara Tarik Menarik Kepentingan

Pembahasan mengenai eksploitasi tubuh perempuan PSK dapat dilihat dalam beberapa sudut pandang. Sudut pandang tersebut antara lain perempuan PSK diantara pihak-pihak yang berkepentingan, perempuan PSK diantara kepentingan ekonomi, perempuan PSK diantara kepentingan kesehatan, perempuan PSK diantara kepentingan keamanan, dan terakhir perempuan PSK diantara kepentingan dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Isi dari sub bab ini adalah peneliti ingin menjelaskan posisi perempuan PSK di dalam beberapa kepentingan yang secara tidak langsung membuat tubuh perempuan PSK diperebutkan oleh berbagai kalangan kepentingan.

III.3.1. Perempuan PSK dan Kepentingan Ekonomi

Kadaan wisma dan tarif yang dipasang di Lokalisasi Dolly dan Lokalisasi Jarak mengalami perbedaan. Di Lokalisasi Dolly, mucikari atau pengelola wisma biasanya menyewa wisma dari pemilik wisma dengan harga tertentu. Perempuan PSK sudah dikenakan tarif yang ditentukan oleh pemilik wisma dan mucikari tanpa ada negosiasi harga. Penentuan harga perempuan PSK

dilihat dari umur, kecantikan wajah, dan bentuk tubuh perempuan tersebut. Kehidupan para perempuan PSK di wisma sehari-hari juga dikenakan tarif karena mereka harus tinggal di wisma tersebut. Harga yang dibayarkan pelanggan atas perempuan PSK diberikan kepada kasir di wisma tersebut. Kemudian tarif yang dikenakan pada satu orang PSK dibagi kepada makelar (laki-laki yang menawarkan perempuan PSK di pinggir jalan), mucikari atau mami papi (pengelola wisma), dan kepada perempuan PSK itu sendiri. Pemilik wisma mendapatkan keuntungan bersih dari mucikari tersebut.

Lain lagi di Lokalisasi Jarak. Pengelolaan dan sistem bagi hasil atas tarif perempuan PSK lebih tradisional daripada di Lokalisasi Dolly. Tarif dikenakan berdasarkan kesepakatan antara perempuan PSK dan pelanggan yang datang. Di Lokalisasi Jarak, perempuan PSK biasanya menemani kewanitaan para pelanggan dengan cara menemani minum-minuman beralkohol dan karaoke. Apabila pelanggan yang datang meminta lebih dan untuk berhubungan seksual, maka barulah tarif ditentukan atas kesepakatan antara pelanggan dan perempuan PSK tersebut. Tarif yang dikenakan untuk sekali menemani minum dan karaoke adalah Rp 50.000,00/jam. Sehingga keuntungan bersih yang didapat adalah dari penjualan minuman beralkohol seperti wawancara dengan informan berikut ini :

“Lebih dari satu krat Mbak. Biasanya 4 krat. Kalau diuangkan ya biasanya misalnya diambil *batinya* (untungnya) aja ya, sampe 400 atau 300 gitu. Semalam kan karaoke itu ngga ada mbayar Mbak. Cuma jualan bir aja, sama nemeni nyanyi gitu. Cuma dapat *bati* (untung) dari bir itu aja.”

(Wawancara dengan IA, 29 Maret 2015)

Keuntungan bersih yang bisa diperoleh dengan hanya menemani minum dan karaoke di wisma-wisma Lokalisasi Jarak berkisar Rp 300.000,00

hingga Rp 400.000,00 dalam satu malam. Jumlah itu adalah keuntungan yang didapatkan apabila pelanggannya dalam hitungan normal sekitar 10 orang. Apabila pelanggan datang lebih banyak hingga 20 orang, keuntungan rupiah yang didapatkan juga lebih banyak. Penghasilan semalam yang didapatkan dibagi hasil antara mucikari atau mami papi (pengelola wisma) dan perempuan PSK. Biasanya mucikari juga memberikan upah kepada operator musik sekaligus pengantar atau pemasok minuman beralkohol ke wisma tersebut.

Perempuan PSK di Lokalisasi Jarak tidak selamanya menetap seperti di Lokalisasi Dolly. Mereka kadang berpindah-pindah wisma sesuai dengan kebutuhan dan panggilan atau pesanan mucikari tertentu. Apabila mucikari sedang tidak memiliki perempuan PSK di wismanya, maka mucikari akan memanggil perempuan PSK *freelance* untuk menemani pelanggan yang datang ke wismanya seperti pernyataan informan berikut ini :

“Kadang itu kalo ada orang minum ngga ada anak-anak gitu aku kan punya nomere anak-anak yang kerja *freelance* itu to. Itu tak telfon sama saya. “*Yo opo iso mbandari?*” (“Bagaimana bisa membantu menemani pelanggan ?”), “*Iyo*” (iya). Yawes dia kesitu wisan (ya akhirnya dia kesana). Itu nemeni orang minum itu. Satu jam’e 50, dibagi 2 saya sama yang kerja itu. Aku 20 dia 30.”
(Wawancara dengan IA, 29 Maret 2015)

Kalo *freelance* itu kadang ngasih ke yang manggil tadi itu. Ya ngga mesti ngasinya kadang 50 kalau banyak, ya dibeliin rokok buat papinya gitu kasian.
(Wawancara dengan ST, 29 Maret 2015)

Tarif atau harga yang diberikan kepada pelanggan apabila sekedar menemani minum dan karaoke sebesar Rp 50.000,00/jam. Pembagian hasil yang diberikan antara mucikari dengan perempuan PSK adalah dibagi dua yakni mucikari mendapat Rp 20.000,00 sedangkan perempuan PSK mendapat Rp

30.000,00. Pembagian hasil ini sama antara perempuan PSK yang tinggal di wisma Lokalisasi Jarak maupun yang menjadi *freelance*.

Selain menemani minum dan karaoke, perempuan PSK di wisma Lokalisasi Jarak juga menawarkan jasa sebagai “teman kencan” atau untuk berhubungan seksual. Biasanya dalam semalam keuntungan yang didapatkan dari “teman kencan” sekitar Rp 600.000,00. Total keuntungan itu didapatkan dari beberapa kali kencan dengan pelanggan dalam semalam. Seperti yang dibahas di awal bahwa untuk menentukan tarif kencan disepakati antara perempuan PSK dengan pelanggan tersebut seperti wawancara dengan informan berikut ini :

“Ya ngga pake tarif. Apa ya kadang yaa dikasih segini 200, 300. Jadi emang nggak menentukan berapanya. Itu biasanya sampai seselesaiannya.”

“Kalo tidur ya bayar kamar Rp 25.000,00. Itu aja yang dikenakan. Biasanya kalo dapet Rp 200.000,00 bayar kamarnya Rp 25.000,00 saya Rp 175.000,00. Ya kalo nemenin minum kan pasti ada cas-casan tapi udah dipotong dari orang yang minum, ngga kepotong dari saya. Satu jamnya Rp 50.000,00 cuman fifty-fifty 25-25 sama mami atau papi.”
(Wawancara dengan ST, 29 Maret 2015)

Biasanya apabila tempat kencan dilakukan di dalam wisma di Lokalisasi Jarak, maka bagi hasil yang diberikan kepada mucikari hanya untuk membayar kamarnya sebagai hitungan sewa kamar. Sebesar Rp 25.000,00 diberikan kepada mucikari untuk sekali kencan. Sedangkan sisanya untuk perempuan PSK tersebut. Berbeda dengan Lokalisasi Dolly yang tidak memasukkan tarif kamar ketika kencan, karena kamar yang digunakan sudah termasuk biaya yang dikenakan kepada pelanggan atau tamu kencan tersebut.

Kuangan yang menjadi hak para PSK terkadang tidak dibayarkan oleh mucikari karena permasalahan hutang yang dibebankan. Kasus ini sering terjadi di

Lokalisasi Dolly. Sehingga perempuan PSK harus juga mempersiapkan diri dan dengan cermat menyimpan serta mempergunakan uangnya agar tidak diakali oleh mucikarinya. Karena di Dolly pengaturannya lebih sistematis dan modern daripada di Jarak, seringkali hal yang dilakukan oleh perempuan PSK adalah melakukan arisan antar PSK untuk menyimpan dan mengelola keuangannya diluar pengelolaan mucikari dan pemilik wisma.

Ketika Lokalisasi Dolly-Jarak ditutup oleh Pemerintah Kota Surabaya, seluruh mucikari dan PSK yang terdaftar diberikan bantuan stimulan sebesar Rp 5.050.000,00 yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bagi mereka yang mengambil bantuan stimulan ini kemudian memiliki beberapa pilihan sebagai langkah tindak lanjut, dipulangkan ke daerah asal atau beralih profesi dan keluar dari dunia prostitusi. Namun pemberian dana stimulan ini ternyata tidak seluruhnya menjadi milik mucikari dan perempuan PSK.

Di Lokalisasi Dolly, mucikari dan perempuan PSK memilih untuk meninggalkan wismanya dan keluar dari lokalisasi. Dan apabila kita melewati Gang Dolly saat ini, kondisi beberapa wismanya sudah tidak terawat karena dibiarkan begitu saja tanpa ada keputusan dan tindak lanjut dari pemilik wisma atau Pemerintah Kota Surabaya.

Sebagian perempuan PSK ada yang dipulangkan, sebagian ada yang beralih profesi, dan sebagian memilih untuk menjadi pekerja *freelance* dengan tinggal di kos-kosan sekitar lokalisasi. Keadaan perempuan PSK ini juga berlaku di Lokalisasi Jarak. Namun yang berbeda adalah mucikari yang mengelola wisma-

wisma di Lokalisasi Jarak ini harus membagi dana bantuan stimulan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik wismanya seperti kutipan wawancara dengan informan berikut ini :

“Ngga ada usaha lain Mbak. Uang segitu yo tak buat nutup kamar-kamar, gitu dulu pemerintah disuruh ngga boleh ada kamar-kamar gitu. Terus tak buat itu nutupin itu. Ya ngga ada uangnya memang itu dibagi sama yang tuan rumah punya rumah itu. Kan ijinnya kan dicabut kan nggak tau ijin-ijin apa gitu dicabut. Cuman kan ijin dari kelurahan ajaya. Itu dulu mbayar saya itu satu tahun 600 ribu. Lah tuan rumah saya itu yang punya rumah itu, yang saya kontrak itu kan ya tanda-tangan gitu ya, akhirnya dia minta Rp 1.500.000,00 yang aku dikasi uang pemerintah itu Mbak. Itu diminta segitu Rp 1.500.000,00 sama yang punya rumah itu. Makanya aku nggak dapet apa-apa. Terus dapet sekian sisanya itu ya tak pake betulin rumah itu, buat betulin kursinya, katanya kalau nggak gitu gak tau tuan rumah saya itu kok orangnya kaya gitu.”

(Wawancara dengan IA, 29 Maret 2015)

Kepentingan ekonomi ternyata tidak hanya terjadi antara perempuan PSK kepada mucikarinya. Melainkan juga antara mucikari dan pemilik wisma. Dana bantuan stimulan itu sebagian harus diberikan kepada pemilik wisma sebagai kompensasi atas pengurusan pencabutan izin operasional. Sehingga mucikari di setiap wisma yang dimiliki oleh pemilik wisma tersebut harus menyetorkan uang sebesar Rp1.500.000,00. Di Lokalisasi Jarak, seorang pemilik wisma bisa memiliki 5 – 10 wisma. Keuntungan yang didapat dengan mengambil dana stimulan bagi mucikarinya lumayan tinggi.

Sisa uang yang ada digunakan oleh mucikari untuk membongkar skat-skat yang awalnya merupakan kamar-kamar perempuan PSK. Hanya dengan menunggu kontraknya habis, maka mucikari tersebut biasanya akan beralih pekerjaan lain atau pulang ke kampung halaman sama dengan perempuan PSK. Wisma-wisma yang ada pun bisa dialihfungsikan oleh pemilik wismanya menjadi

rumah tangga atau menjalankan usaha lain. Sehingga perputaran ekonomi akan kepentingan perempuan PSK pun tidak akan berhenti selama masih ada kendali dari pemilik wisma dan mucikarinya.

Sosialisasi sebenarnya sudah sering dilakukan dari pihak Pemerintah Kota Surabaya dan tokoh agama di sekitar lokalisasi bahwa suatu saat lokalisasi itu akan ditutup. Namun kepastian kapan itu yang tidak diberitahukan. Hanya pada tahun tertentu saja disebutkan bahwa kabarnya tahun 2014 menjadi momentum penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan antara lain dengan mengadakan arisan, pengajian, siraman rohani, dan pemberitahuan yang biasanya dilakukan di balai RW seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini :

“Sering Mbak kalo sosialisasi. Kadang itu dua kali dalam seminggu kumpulan. Ya acara kayak gitu dibilangin pengajian-pengajian diceramahin gini-gini. Yaiya saya datang, diceramahin ya uang itu disimpan kan dibilangin apa anak-anak yang kerja-kerja gitu ya dibilangin kalo ini mau ditutup.”

(Wawancara dengan IA, 29 Maret 2015)

Seluruh mucikari, perempuan PSK, dan pihak-pihak yang tidak setuju dengan penutupan lokalisasi memilih untuk turun aksi ke jalan dan memblokir beberapa titik jalan masuk ke lokalisasi. Mereka dimotori oleh sebuah LSM yang menolak penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak dengan beberapa alasan. LSM dan gabungan beberapa perkumpulan yang menolak penutupan mengakomodir aksi dengan menggunakan kaos berwarna hitam, turun ke jalan, membuat spanduk dan tulisan-tulisan yang berisi penolakan penutupan lokalisasi. Selain itu mereka melakukan seruan agar pihak yang menolak untuk turun aksi seperti yang disampaikan informan berikut ini :

“Oh iya, wong disuruh unjuk rasa gitu, ya ikut, hehehe. Iya tapi gini (sambil menutup mulut). Pake masker gitu. Yang nyuruh itu ya kaya ketua gitu siapa sih namanya yang kena itu hhm Pokemon gitu. Kan banyak kan, Mbak. Pak Suroso itu kan wakile. Pak Suroso yang di wisma 41 itu. Wes ikut melok-melok ae Mbak. Ya disuruh gini-gini iyowes opo jare ae. Iya ikut semua.

Apa mbak dikasih kaos, beli itu. 30. (Rp 30.000,00)

Eenggak, ngga ada dikasih uang. Cuma ikut-ikutan aja. Daripada ditutup gitu katanya sih.”

(Wawancara dengan IA, 29 Maret 2015)

Aksi turun ke jalan untuk menolak penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak dimotori antara lain oleh FPL yang nama – nama penggerakannya disebutkan di atas oleh informan. Kegiatan yang dilakukan tersebut bagi sebagai mucikari dan perempuan PSK bukan atas dasar kesadaran pribadi melainkan ikut-ikutan karena terprovokasi oleh pihak yang memotori. Sehingga perempuan PSK pun dihadapkan pada pilihan diam atau ikut ke dalam aksi tersebut. Selain itu kaos yang digunakan dalam aksi tersebut tidak berasal dari dana swadaya LSM, melainkan setiap yang mengikuti aksi penolakan harus membayar uang kaos sebesar Rp 30.000,00. Pesan yang disampaikan oleh para pemotor itu adalah apabila seluruh mucikari, PSK, dan gabungan masyarakat tidak turun aksi ke jalan, maka lokalisasi akan ditutup.

Karena informan juga merasa ikut-ikutan dan tahu tujuannya agar lokalisasi tidak tutup, maka mereka seperti tidak dapat menentukan sikapnya sendiri. Disisi lain setelah melakukan aksi turun ke jalan, mereka justru menerima dan mengambil dana stimulan yang diberikan oleh pemerintah seperti kutipan wawancara dengan informan berikut ini :

“Ada dulu yang ngga ngebolehkan ngambil, tapi aku ya tetep ngambil. Kalo nggak diambil tetep ditutup gitu kata orang-orang ada yang bilangin aku gitu. “ambilen ae”.”

(Wawancara dengan IA, 29 Maret 2015)

Pengambilan dana stimulan adalah langkah awal atau harapan bagi mucikari dan perempuan PSK untuk dapat beralih profesi dan keluar dari kegiatan prostitusi. Namun setelah penutupan lokalisasi yang terjadi kurangnya tindak lanjut pemerintah kepada mucikari dan PSK sehingga mereka sampai pada pilihan pulang ke kampung halaman, menunggu bantuan keterampilan dari pemerintah, atau mereka kembali bekerja masuk ke dalam kegiatan prostitusi kembali.

III.3.2. Perempuan PSK dan Kepentingan Keamanan

Bertahannya Lokalisasi Dolly-Jarak di Kota Surabaya tidak lepas dari pihak-pihak yang melanggengkan kegiatan prostitusi di dalamnya. Salah satunya adalah mendapat keamanan dari pihak berwenang. Apabila di dalam sebuah lokalisasi terdapat pihak yang mampu menjamin keamanan seluruh unsur di dalamnya tidak akan terusik oleh kepentingan lain, maka lokalisasi dan prostitusi akan terus bertahan. Pola keamanan yang diberlakukan di Lokalisasi Dolly-Jarak adalah dengan menarik uang iuran keamanan dari setiap wisma yang ada. Iuran keamanan tersebut dibebankan kepada mucikari atau pengelola wisma seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini :

“Kalo masalah keamanan di wisma dan lokalisasi itu urusannya mami sama papi Mbak. Saya nggak paham berapa. Kita tinggal ngapain aja di wisma juga aman. Soalnya dulu jarang ada operasi.”

(Wawancara dengan ST, 29 Maret 2015)

Pengelola wisma memberikan iuran keamanan sebagai jaminan bahwa wismanya tidak akan dilakukan operasi yustisi mendadak dan memberikan jaminan akan perempuan PSK miliknya dan dirinya sendiri. Setiap malam iuran

keamanan tersebut dibayarkan kepada hansip yang berpatroli mengunjungi wisma satu ke wisma yang lain. Hansip ini seperti linmas lokalisasi yang khusus mengamankan kawasan lokalisasi yang direkrut oleh RW setempat. Harapan dengan adanya iuran keamanan ini juga fungsi koordinasi yang baik antara pihak keamanan dengan mucikari atau pengelola wisma seperti yang diutarakan oleh informan berikut ini :

“Iya kalo dulu ada yang narikin Mbak. Biasanya hansip. Ngga tahu ya kemungkinan sampe kelurahan. Sampe kelurahan mbuh camat mbuh gitu. Wong Rp 15.000,00 setiap hari. Itu untuk keamanan gitu katanya. Kalo sekarang sudah ngga ada yang *narik'i*. Yo lumayan gaji buta. Jadi satu rumah itu tiap malem Rp 15.000,00 ada orang minum ngga orang minum tetep Rp 15.000,00 ke hansipnya itu.”
(Wawancara dengan IA, 29 Maret 2015)

Setiap malam mucikari atau pengelola wisma memberikan iuran kepada hansip atau linmas lokalisasi sebesar Rp 15.000,00. Iuran ini diberikan baik ketika ada pelanggan maupun tidak ada pelanggan. Apabila ditotal iuran keamanan setiap malam mengambil contoh di RW III sebanyak 100 wisma ada di dalamnya. Secara total berarti iuran keamanan yang dibayarkan sebesar Rp 1.500.000,00 dalam semalam. Ada kemungkinan bahwa iuran keamanan ini sampai kepada kelurahan atau kecamatan. Namun yang pasti iuran keamanan ini juga dikelola oleh RW setempat seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini :

“Gini Mbak ya itu di RW dulu banyak keamanan kan. Misalnya linmas, linmas itu saya rekrut sekitar 25 untuk satu RW. Dari 25 ini ya terus bukan saya gaji, bukan. Itu kan kalo gaji bulanan ya. Bukan, itu dapat uang masuk itu dapat dari pengunjung itu sekitar katakanlah satu malamnya sekitar 900 sampai satu juta lah semalem. Satu juta ini untuk katakanlah untuk anggota linmas yang 20 orang ya katakanlah 50 satu orang, itu udah berapa belum *ngombe* (minum) nya ya kan itu *melek sewengi lohyo* (begadang). *Sampeyan lek gak gelem melek sewengi* dibayar 50 loh, uang 50 sekarang itu kan kurang mencukupi lah. Lek 50 untuk hari ini lohyo, katakanlah kurang mencukupi kalo 50

belum makannya, rokoknya, dan sebagainya itu tak anggep rata-rata 20 orang itu 200, 700 ya belum yang lain-lainnya. Katakanlah ada pamong *dike'i* (diberi) rokok *dikei anu*, paling sisa ya untuk RW sekitar 190 sampai 200 lah. Itu semalam, itupun dibuat untuk kegiatan, makanya ya kalo diliat dadi RW Jarak iku enak duik tok, kalo nggak tau memang berbicara seperti itu. *Nek ngelakoni* baru tau.”
(Wawancara dengan Pak Tjukup, 29 April 2015)

Uang iuran keamanan yang dibayarkan masuk dan dikelola oleh RW setempat yang memiliki lokalisasi di dalamnya. Digunakan untuk membayar operasional linmas lokalisasi bahkan ke kas RW untuk digunakan kegiatan-kegiatan RW seperti karang taruna, PKK, dan pengajian. Pemasukan dari pengunjung berarti bahwa iuran keamanan diberlakukan sama rata apabila ada pengunjung atau tidak ada pengunjung dari wisma tersebut. Perbedaannya terlihat antara sebelum dan sesudah penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Sebelum penutupan lokalisasi, jarang bahkan tidak ada operasi berkeliling ke wisma-wisma karena sudah ada iuran keamanan kepada linmas lokalisasi. Namun setelah penutupan lokalisasi, operasi atau patroli menjadi lebih sering seperti kutipan wawancara dengan informan berikut ini :

“Kalo dulu itu sama sekali nggak ada operasi Mbak. Semenjak ditutup itu tiap malem operasi terus Mbak. Itu yang keliling itu Satpol PP. Ya tergantung kadang jam 9, jam 10, jam 12, jam 3 malam lo pernah. Ya disini kata orang-orang sih. Mereka cerita tadi malem ada itu.”
(Wawancara dengan IA, 29 Maret 2015)

Apabila ditelusuri secara berurutan bahwa yang bekerja di wisma adalah para perempuan PSK. Kemudian dari hasil menemani pelanggan, perempuan PSK harus membagi hasilnya dengan mucikari. Mucikari hanya mendapatkan uang dari hasil kerja PSKnya. Mucikari membayarkan uang iuran kepada hansip atau linmas lokalisasi. Dari linmas kemudian juga masuk menjadi

operasional dana yang digunakan untuk kegiatan di dalam RW. Jadi apabila dirunutkan bahwa perempuan PSK juga digunakan sebagai kepentingan kemanan dan operasional di lokalisasi. Dengan mereka bekerja kemudian hasilnya bisa sampai pada keamanan di tingkat RW.

III.3.3. Perempuan PSK dan Kepentingan Kesehatan

Kepentingan kesehatan bagi perempuan PSK menjadi perhatian yang cukup penting. Karena ketika mereka bertemu dengan para pelanggan atau tamu, tidak ada yang bisa menjamin bagaimana kesehatan dari pelanggan tersebut. Sehingga yang bisa dilakukan adalah tindakan preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh para perempuan PSK itu sendiri dengan menggunakan pengaman ketika berhubungan atau dengan mendapatkan pengobatan yang diberikan melalui suntikan atau antibiotik.

Di Lokalisasi Dolly-Jarak, Dinas Kesehatan Kota Surabaya melalui kerjasama antara Puskesmas Putat Jaya, pihak RT dan RW serta pengelola wisma menekan jumlah penyebaran penyakit menular yang seringkali muncul di dalam lokalisasi. Penyakit tersebut antara lain seperti penyakit kelamin dan penyebaran HIV/AIDS. Oleh karena itu sebelum adanya penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak, setiap Hari Kamis yakni sekali dalam seminggu dilakukan pemeriksaan kesehatan khususnya bagi perempuan PSK di wisma-wisma yang sudah terdaftar melalui RT dan RW dan pihak puskesmas. Pemeriksaan ini meliputi pengambilan dan pengecekan sampel darah, pemberian antibiotik, dan pembagian alat pengaman ketika berhubungan seperti yang diungkapkan oleh dua informan yang mengalami pemeriksaan kesehatan berikut ini :

“Iya Mbak. Setiap Kamis, satu minggu kok. Palingan ya, lek nggak satu minggu satu bulan palingan ya. Ke puskesmas itu. Iya anak-anak itu yang diperiksa. Tapi ya aman. Itu kan disuntik terus dilihat darahnya, kalo minum-minum gitu kan takut ada apa gitu. Kalo yang di Jarak ini ngga seberapa, kalo yang di Dolly itu banyak Mbak. Soalnya itu kan khusus cari tamu *gonta-ganti* (bergantian) gitu untuk tidur.”

(Wawancara dengan IA, 29 Maret 2015)

“Iya dulu sempet dapet dari pemerintah. Setiap Hari Kamis seminggu sekali ya itu periksa ke puskesmas. Harus periksa gitu. Ya suntik itu periksa kesehatan supaya aman ngga kena HIV/AIDS. Tapi Alhamdulillah aman-aman aja. Iya gratis. Cuma apa ya tambah kalo ngga dateng dikenakan biaya. *Cek dateng* (supaya datang) gitu.”

(Wawancara dengan ST, 29 Maret 2015)

Pemeriksaan kesehatan di Lokalisasi Dolly-Jarak menjadi sebuah kewajiban bagi setiap perempuan PSK yang terdaftar di wisma-wisma. Apabila mereka tidak melakukan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut, justru mereka dikenakan biaya ganti rugi atas pengobatan tersebut. Perbedaan antara Lokalisasi Dolly dan Lokalisasi Jarak dalam hasil pemeriksaan kesehatan memang berbeda. Di Dolly interaksi yang dilakukan antara perempuan PSK dengan pelanggan adalah khusus untuk berhubungan seksual, sehingga penyebaran akan penularan penyakit kelamin atau HIV/AIDS memiliki kemungkinan yang lebih tinggi daripada di Jarak. Di Jarak interaksi yang dilakukan adalah dengan penjualan minuman beralkohol dan perempuan PSK hanya menemani minum, baru apabila ada kesepakatan lebih jauh dan harganya sesuai mereka melayani pelanggan untuk berhubungan seksual.

Pemeriksaan kesehatan ini juga melibatkan petugas RW dan RT setempat yang wilayahnya memiliki wisma. Tugas dari RW dan RT selain

melakukan pendataan juga mengarahkan perempuan PSK untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas seperti yang diungkapkan Ketua RW III berikut ini :

“Berhubung dari Dinas Kesehatan pemerintah kota tiap hari Kamis itu ada memang ada kesini diambil darahnya, sampel darahnya diperiksa. Kalo memang anak itu terjangkit penyakit yang membahayakan seperti itu langsung dikarantina. Jadi penyebarannya itu nggak bisa keluar. Justru sekarang ini penyebarannya malah berbahaya. *Wes gak karuan* (sudah tidak beraturan), nggak terkontrol. Kalo di lokasi disini tiap hari Kamis itu dari Dinas Kesehatan dia ambil darah. Kalo dia nggak datang petugas RT eh petugas RW maupun stafnya itu ambil anak ini dibawa digiring ke sana ke puskesmas untuk diambil darahnya. Seperti itu kalo yang dulu. Seminggu sekali itu memang diprogramkan dari Dinas Kesehatan maupun didukung dengan aparat puskesmas dan aparat RT RW sehingga warganya itu jelas kita. Dan orang itu terkontrol. Penyakit A itu *kenak mak des!* (langsung terkena) langsung diisolasi. Dikarantina ada itu tugasnya Yayasan Abdi Asih. Melalui Bu Verra itu, nah ini disalurkan ke mungkin diisolasi kemana ke Keputih atau ke Rumah Sakit dr. Sutomo. Sehingga betul-betul beban mental psikologinya ini nggak seberapa terbebani. Kalo tetep diperkerjakan *nggak karuan dadine* (tidak benar jadinya).”
(Wawancara dengan Pak Tjukup, 29 April 2015)

Kekhawatiran dari RT dan RW apabila perempuan PSK di wilayahnya tidak memeriksakan kesehatan secara gratis ke Puskesmas Putat Jaya adalah penularan penyakit yang lebih luas. Sehingga dengan antisipasi awal, harapannya adalah penekanan angka orang-orang yang terjangkit penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Apabila diketahui positif HIV/AIDS maka perempuan PSK ini tidak diperkenankan lagi untuk bekerja dan harus melakukan perawatan di Rumah Sakit dr.Sutomo milik Pemerintah Kota Surabaya atau melalui Yayasan Abdi Asih. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa peran Yayasan Abdi Asih memang fokus terhadap perempuan PSK yang positif HIV/AIDS untuk dirawat dan diberikan pelatihan. Karena sudah tidak bisa bekerja sebagai PSK, maka perempuan tersebut

diarahkan untuk menjadi mandiri dengan melakukan pelatihan secara berkelanjutan di Yayasan Abdi Asih.

Fasilitas pemeriksaan kesehatan yang didapatkan para perempuan PSK di wisma ternyata tidak didapatkan oleh perempuan PSK yang bekerja bebas atau *freelance*. Karena mereka bekerja diluar wisma dan tidak ada pendataan secara khusus dari pihak RT, RW, maupun Puskesmas Putat Jaya maka pemeriksaan kesehatan didapatkan dengan biaya pribadi. Sehingga pemeriksaan berkala secara gratis tidak diberlakukan kepada perempuan PSK yang bekerja *freelance* seperti wawancara dengan informan berikut ini :

Kalo *freelance* enggak. Nggak dari puskesmas. Jaga kesehatannya ya minum antibiotik, vitamin gitu. Jadi kalo nggak di wisma kan udah jaga diri sendiri kan. Kalo di wisma kan ditanggung sama wisma gitu. Kalau *freelance* itu biaya sendiri ya saya ke apotek beli antibiotik sendiri. Enggak kaya amoxilin gitu.
(Wawancara dengan ST, 29 Maret 2015)

Pencegahan penularan penyakit bagi para perempuan PSK *freelance* dilakukan dengan cara tindakan preventif dan kesadaran akan kesehatan tubuhnya sendiri. Tidak mendapatkan pelayanan gratis dari puskesmas perempuan PSK tersebut harus membeli obat-obatan sebagai pencegah penularan penyakit kelamin dan HIV/AIDS dengan meningkatkan antibodi tubuh serta meminum vitamin dan antibiotik. Selain itu kebanyakan perempuan PSK *freelance* sadar apabila tidak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, maka penggunaan alat pengaman sebelum berhubungan dengan pelanggan seperti yang diutarakan informan berikut ini :

Iya, saya yang minta untuk pake pengaman. Kalau dianya nggak mau ya saya nggak mau. Saya berusaha jaga diri.
(Wawancara dengan ST, 29 Maret 2015)

Perempuan PSK dengan kepentingan kesehatan menjadi penting untuk diperhatikan karena terkait penyebaran penyakit yang dampaknya bisa menyebar bahkan ke masyarakat. Apabila di dalam lokalisasi dan di wisma-wisma, kesehatan perempuan PSK serta penularan penyakit kelamin serta HIV/AIDS bisa dikontrol dan dimonitor dengan jelas oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya melalui Puskesmas Putat Jaya. Setelah adanya penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak kesehatan dan penularan penyakit ini yang tidak bisa dipantau mengakibatkan masyarakat yang tidak bersentuhan langsung dengan kegiatan prostitusi dan hubungan seksual juga tertular penyakit tersebut. Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya juga bertambah karena tidak bisa lagi mencegah, mendata, memonitor, dan memberikan pengobatan secara gratis kepada perempuan PSK.

III.3.4. Perempuan PSK dan Kepentingan Politik

Pembahasan sebelumnya menjelaskan bahwa DPRD sebagai badan legislatif yang bersama dengan lembaga eksekutif memiliki peran dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Penjelasan yang diungkapkan oleh informan terlihat bahwa DPRD kurang setuju dengan konsep yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Namun apabila dilihat lebih jauh, di dalam DPRD sendiri terdapat fraksi dan komisi yang berbeda pula. Sehingga kepentingan yang diperjuangkan pun bisa berbeda.

Seperti yang diungkapkan oleh Pak Deddy dari Dinas Sosial bahwa DPRD ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Terjadinya pro kontra lumrah terjadi karena perbedaan kepentingan. Ada yang memperjuangkan

kepentingan konstituen di daerah pemilihannya dan ada juga yang memperjuangkan kepentingan partai politik pengusungnya. Dalam proses penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak di Kota Surabaya, DPRD Kota Surabaya pun memiliki kepentingan berbeda. Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014, M.Machmud yang berasal dari Partai Demokrat menyatakan setuju dengan penutupan Lokalisasi Dolly – Jarak yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2014. Sedangkan ketua dan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019, Agustin Poliana dan Anugrah Ariyadi menyatakan kurang setuju dengan penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak.

Adanya perbedaan ini salah satunya dipengaruhi oleh kepentingan fraksi masing-masing dalam tubuh DPRD. Fraksi yang kurang setuju dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Fraksi PDI-P memiliki kantong atau suara pemilih di wilayah Dolly-Jarak yang masuk ke dalam Dapil IV Kota Surabaya. Dapil IV Kota Surabaya terdiri dari Kecamatan Dukuhpakis, Gayungan, Jambangan, Sawahan, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo.

Salah satu anggota PDI-P yang secara aktif melakukan kampanye di wilayah Dolly-Jarak adalah Sukadar atau yang biasa disapa Cak Kadar. Pada saat pemilihan umum legislatif 2014-2019, Sukadar yang berasal dari Dapil IV memperoleh suara sebesar 5.331 suara. Kampanye yang dilakukan oleh Sukadar dilakukan dengan cara mencari massa dan dukungan di wilayah Dolly-Jarak melalui RW dan RT setempat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tjukup selaku Ketua RW III berikut ini.

Bukan, tapi mayoritas (orang merah) bukan kebanyakan. Kan beda sama kebanyakan. Tapi kebanyakan orang ini. Kan kalo mayoritas kan di dalamnya banyak, ada PKB, PDIP, dan lain-lainnya kan partai nggak satu tok. Memang dulu dari pak siapa itu hhm Pak Kadar selaku dulu pernah nyalonkan kan anggota DPR kan, yang mungkin suaranya terbanyak dari sini. Pak Kadar itu anggota DPR kalau nggak salah sekarang. Komisi C kalo nggak salah. Sekarang jadi dia. Katakan dia sering main kesini kan. Wong namanya mencalonkan kan dia sering kesini cari-cari massa, padahal *omahe* Petemon sini. Itu dari PDIP.

Iya mayoritas. Dia nggak pernah menjanjikan sesuatu, cuma dia itu sebagai orang Sawahan katakan masih orang Sawahan, iya daerah sini lah kenapa kita pilih orang luar kalo orang daerah sini ada yang mencalonkan gitu loh. Dia nggak beli apa-apa. Dia *nggak anu* nggak diberi apa-apa. Tanyakan Pak Kadar. Dia itu *mek nggowo* hhm jahe merah itu loh untuk pengembangan masalah budidaya jahe merah kan khasiatnya banyak sekali. Jadi orang kan tertarik. Coba *sampeyan lek watuk keono jahe merah lak waras*. Jadi budidaya itu dia. Jahe merah. Bukan masalah uang dan bukan masalah anu, enggak. Cuma dia ke masyarakat itu anu istilahnya bagaimana ya, hhm *kenek didelok ngono loh*. Supaya ada calon disini yang jadi anggota DPR disana. Gitu loh. Jadi *wong* Jarak pun bisa. Terus *mek* gitu. Sedangkan Pak Wisnu aja rumahnya sini. Nemplek *mbek* Sidokumpul iku, sak wilayah, Pak Wisnu itu loh Dukuh Kupang pojokan, Pak Wisnu wakil anu itu. Ya maksudnya kan seperti itu gitu loh. Saya ya mungkin Pak Kadar ngadep saya ya pernah dulu. Waktu kampanye ya saya yang ngomong-ngomong dengan saya kok. *Lebokno* jahe merah untuk pembudidayaan pada pengembangan jamu. Waktu itu, saya nggak menjanjikan, cuma *lek de'e* anu aku dadi tak ewangi gitu loh. Hehehe. Bukan menjadikan, tapi *tak ewangi*. Cuma *lek wong sitok yo kalah karo wong sepuluh kan*. Jadi *nggak isok ngangkat lah*.

(Wawancara dengan Pak Tjukup, 29 April 2015)

Pendekatan yang dilakukan oleh Sukadar adalah pendekatan dengan RW dan RT setempat agar mampu memperoleh suara dalam pemilu legislatif 2014 dari masyarakat Dolly-Jarak. Momentum dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak dijadikan salah satu jurus jitu untuk memperjuangkan nasib dan kehidupan warga di Dolly-Jarak, baik PSK dan mucikari serta masyarakat terdampak penutupan.

Saat penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak, yang terlihat vokal untuk menolak penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak adalah PDI-P. Wakil Walikota Surabaya, Wisnu Sakti Buana bertentangan dengan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Walikota Surabaya yang pada saat itu dengan mantap ingin menutup lokalisasi ternyata tidak didukung oleh wakilnya. Wisnu Sakti Buana dan Sukadar mendatangi warga Dolly-Jarak untuk memberikan pengertian dan jaminan untuk membantu warga disana agar lokalisasi tidak ditutup.

Namun selama proses penutupan lokalisasi berjalan, sering terjadi polemik dan keluhan masyarakat kepada pemerintahan maupun anggota dewan. Sehingga dalam perjalanannya pun, PDI-P yang masih menyayangkan penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak karena tidak diimbangi dengan pengawasan dan sikap tegas dari Pemerintah Kota Surabaya.

Kepentingan-kepentingan politik seperti inilah yang menjadi salah satu kepentingan yang muncul di Lokalisasi Dolly-Jarak dan dirasakan oleh perempuan PSK. Janji-janji yang diberikan pada saat kampanye atau bantuan yang dijanjikan tidak diberikan, sehingga menimbulkan kekecewaan. Kontestasi dalam Pemilu Legislatif 2014 juga dijadikan momentum untuk memperoleh dukungan. Janji memperjuangkan kehidupan yang lebih baik di Lokalisasi Dolly-Jarak masih harus terus disuarakan oleh orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab. Tidak hanya sebatas mengkonversi suara pemilih dalam pemilu legislatif, melainkan juga bertanggung jawab terhadap konstituen di daerah pemilihannya.

III.4. Analisis Teoritik

Peta kekuatan kepentingan yang ada dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak di Kota Surabaya terdiri dari yang setuju dan tidak setuju atau pro dan kontra. Pemetaan dilakukan berdasarkan kepentingan dari masing-masing pihak yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya mengenai peta kepentingan dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Berikut adalah peta kepentingan dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak



Kepentingan yang setuju terhadap penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak antara lain Pemerintah Kota Surabaya, ormas Islam, Camat Sawahan atau Muspika, dan Lurah Putat Jaya. Pihak-pihak ini setuju dengan adanya penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak karena berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan mengangkat derajat masyarakat. Sudah banyak keresahan

masyarakat yang ditimbulkan dengan adanya lokalisasi sehingga harus ditutup dan dialihfungsikan agar prostitusi mampu dikurangi dan membuat masyarakat menjadi lebih baik.

Pemerintah Kota Surabaya bersama instansi dinas dan jajaran terkait setuju dengan adanya penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak karena sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan wilayah. Oleh karena itu Pemkot Surabaya dan jajarannya sebagai perwakilan negara berhak untuk melakukan kewenangan dan kekuasaan untuk menutup Lokalisasi Dolly-Jarak. Berdasarkan peraturan daerah memang sudah ada larangan tertulis, sehingga Pemerintah Kota Surabaya dirasa tidak perlu untuk membuat Surat Keputusan Wali Kota.

Kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh negara adalah menutup lokalisasi, mengalihfungsikan wisma-wismanya, dan mempersiapkan alih profesi bagi mucikari, PSK, dan masyarakat terdampak. Karena kewenangan tersebut juga menggunakan kekuatan hukum, polisi, dan aparat keamanan, maka negara memiliki kewenangan sah untuk membuat putusan final dan mengikat bagi seluruh masyarakat yang ada di Lokalisasi Dolly-Jarak.

Apabila ditemukan pelanggaran di dalamnya, maka negara berhak untuk menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersalah sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan maupun undang-undang. Namun yang sangat disayangkan dari proses penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak ini adalah kurangnya hubungan komunikasi Pemerintah Kota Surabaya terhadap elemen-elemen yang ada di dalam lokalisasi. Sebagai fokus utama dalam penelitian ini adalah perempuan

PSK, maka yang ingin dikritisi bahwa masih kurangnya peran negara kepada perempuan PSK. Hal ini dibuktikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya terutama Walikota Surabaya tidak pernah duduk bersama untuk memecahkan solusi bersama dengan perempuan PSK sebagai kelanjutan dari penutupan lokalisasi.

Pemberian bantuan dana stimulan dan pemberian pelatihan *soft skill* bukan berarti negara telah menyelesaikan tanggung jawabnya kepada perempuan PSK. Pemberian bantuan seperti dua hal di atas dirasa percuma dan sia-sia apabila tidak ada tidak lanjut dari Pemerintah Kota Surabaya beserta jajaran sampingnya untuk memberikan kepastian pemasaran dan pengawasan program pemberdayaan tersebut. Bahwa perempuan PSK yang ada di Lokalisasi Dolly-Jarak juga tidak bisa dieksploitasi tubuhnya untuk menjalankan program kesejahteraan dan menekan angka prostitusi di Kota Surabaya.

Kekuatan lainnya adalah menentang penutupan lokalisasi. Pihak-pihak yang termasuk kontra atas penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak antara lain DPRD Kota Surabaya, RW dan RT di lokalisasi, LSM Aktivis Sosial, Pemilik Wisma, Mucikari, Calo/ Makelar, dan masyarakat terdampak langsung penutupan lokalisasi. Secara ringkas dijelaskan bahwa pihak yang menolak adanya penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak dikarenakan memiliki kepentingan mata pencaharian, sumber pendapatan, dan merasa tidak nyaman dengan proses Pemerintah Kota Surabaya dalam menutup lokalisasi.

Pada pembahasan sub bab III.1 tentang peta kekuatan kepentingan, telah dijelaskan secara rinci alasan dan kepentingan yang melatarbelakangi penolakan penutupan. Apabila ditarik benang merahnya, pihak yang kontra masih

memerlukan waktu sedikit lebih lama untuk mempersiapkan mental dan fisik dalam penutupan lokalisasi. Pihak ini juga menjadikan perempuan PSK sebagai bentuk eksploitasi atas kepentingan pendapatan mereka. Seperti contohnya RW dan RT yang memperoleh pemasukan dana dari hidupnya perputaran uang di Lokalisasi Dolly-Jarak. Keuntungan itu didapatkan dengan mempekerjakan perempuan PSK.

Apabila perempuan PSK tidak melayani pelanggan, maka tidak ada pemasukan kepada mucikari, calo, dan pemilik wisma. Sehingga mereka tidak bisa membayarkan uang operasional keamanan kepada linmas lokalisasi dan RW RT setempat. Sudah jelas bahwa alur sederhana tersebut berporos pada eksploitasi tubuh perempuan PSK.

Poros akan eksploitasi tubuh perempuan PSK tidak bisa dilepaskan dari kepentingan seluruh pihak yang telah terpetakan. Sehingga peta kepentingan mampu memunculkan dua kubu yakni pro dan kontra penutupan lokalisasi. Walaupun pada akhirnya semua pihak harus setuju dengan penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak karena kewenangan dari Pemerintah Kota Surabaya lebih besar daripada kepentingan pihak-pihak lain yang menentang penutupan lokalisasi.

Prostitusi merupakan sebuah kegiatan yang di dalamnya terdapat wanita yang dipekerjakan oleh mucikari (orang yang memotong penghasilan para pelacur dengan memberikan imbalan berupa jasa perlindungan dan kontak dengan calon pelanggan) untuk memberikan jasa seks kepada kaum laki-laki. Prostitusi terjadi di dalam Lokalisasi Dolly-Jarak karena terdapat hubungan antara perempuan PSK

dengan mucikari yang mengelola wisma atau yang biasa dipanggil dengan mami atau papi.

Apabila dilihat menurut jumlahnya, prostitusi yang terjadi di Lokalisasi Dolly-Jarak merupakan prostitusi yang berjalan rapih diatur dalam sebuah pengaturan berkelompok. Di dalamnya terdapat pemilik wisma, pengelola wisma / mucikari / mami / papi, makelar atau calo, dan perempuan PSK itu sendiri. Seluruh pengaturan tata tertib, waktu kerja, tarif sewa kamar, tarif melayani pelanggan sudah diatur bagi para perempuan PSK yang bekerja di wisma-wisma. Sehingga mereka hanya tinggal mengikuti alur main yang ditentukan oleh mucikarinya masing-masing.

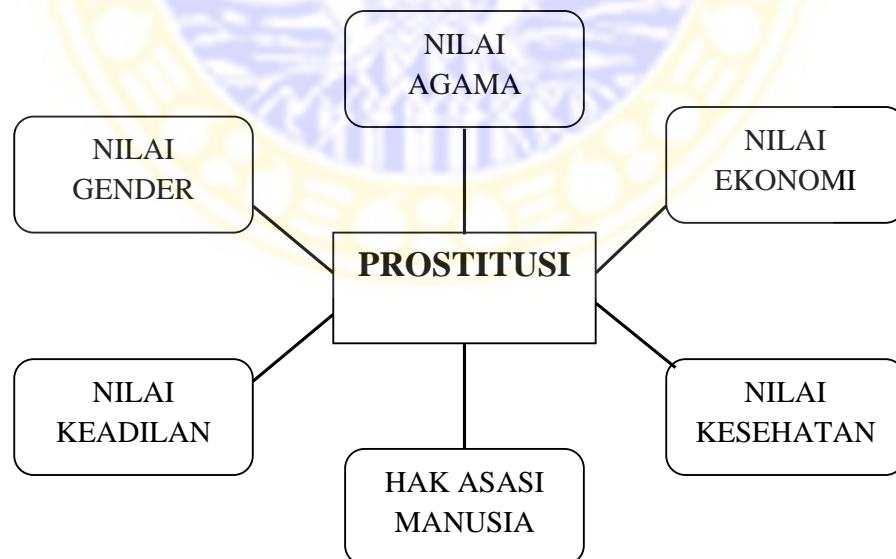
Berdasarkan konsep lokalisasi yang sudah dijabarkan pada Konsep Lokalisasi, Lokalisasi Dolly-Jarak termasuk ke dalam lokalisasi prostitusi yang terdaftar. Dikatakan terdaftar karena pelaku di dalam lokalisasi selalu diawasi oleh pihak keamanan, kerjasama antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, serta mereka berada di dalam sebuah kawasan tertentu tidak menyebar di pinggir jalan. Sebelum penutupan lokalisasi, secara rutin para perempuan PSK juga memeriksakan kesehatan sebagai penanggulangan penularan penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Seluruh penghuni wisma yang ada di Lokalisasi Dolly-Jarak wajib mendaftarkan diri kepada RT dan RW setempat. Sehingga daftar pendataan penghuni wisma bisa disampaikan kepada Lurah Putat Jaya, Camat Sawahan, bahkan hingga Dinas Sosial Kota Surabaya.

Lokalisasi Dolly-Jarak bukan termasuk ke dalam lokalisasi segregasi. Lokalisasi segregasi adalah lokalisasi yang terpisah dari pemukiman penduduk

lainnya. Sedangkan di Dolly dan Jarak, wisma-wisma yang ada bercampur dengan pemukiman penduduk. Sehingga bisa dikatakan bahwa lokalisasi tersebut banyak mempengaruhi kehidupan penduduk sekitarnya. Mulai dari tumbuh kembang anak-anak, perilaku remaja, hingga hubungan rumah tangga penduduk di sekitar lokalisasi.

Prostitusi tidak hanya menjadi kegiatan tunggal yang dilakukan untuk meraih keuntungan. Prostitusi juga memiliki dimensi yang selalu hadir berdampingan dan tidak dapat dilepaskan. Prostitusi selalu dikaitkan dengan nilai gender, nilai agama, nilai ekonomi, nilai kesehatan, nilai keadilan, dan hak-hak asasi manusia. Dimensi dalam prostitusi dijelaskan lebih lanjut dalam Diagram Dimensi Masalah Prostitusi berikut ini.

Bagan III.5
Dimensi Masalah Prostitusi



Dimensi masalah prostitusi yang pertama berkaitan dengan nilai-nilai agama. Prostitusi jelas bermasalah apabila dihadapkan dengan nilai agama. Agama Islam contohnya. Dalam ajaran Agama Islam manusia dilarang untuk melakukan perbuatan zina atau berhubungan dengan yang bukan mukhrimnya. Oleh karena itu bisa dihubungkan mengapa organisasi masyarakat Islam khususnya gabungan Kyai dan Ulama yang ada di Jawa Timur menghendaki dan mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Apabila lokalisasi di Jawa Timur ditutup, maka menurut dimensi nilai agama hal itu akan mengurangi bahkan menghilangkan prostitusi yang dilarang oleh ajaran agama Islam.

Dimensi masalah prostitusi yang berkaitan dengan nilai ekonomi bisa dimulai dengan latar belakang kebanyakan perempuan PSK harus memilih terjun ke dalam prostitusi adalah karena himpitan ekonomi yang kurang mencukupi. Sehingga dengan ajakan kerabat atau tetangga atau teman untuk mencari uang banyak dengan kerja cepat maka perempuan PSK bisa terjerumus ke dunia prostitusi. Selain itu masalah dengan nilai ekonomi dapat muncul apabila diberlakukan mekanisme bagi hasil antara perempuan PSK dengan mucikari atau pengelola wisma yang sudah dijelaskan dalam sub bab perempuan dan kepentingan ekonomi. Terkadang uang hasil dari kerja perempuan PSK ini masih dipegang oleh mucikari dan tidak sedikit yang terlibat hutang dengan mucikarinya.

Masalah kesehatan yang ditimbulkan dengan adanya prostitusi adalah kesehatan pengguna dan perempuan PSK serta penularan penyakit kelamin atau

bahkan HIV/AIDS. Sebelum adanya penutupan lokalisasi, seluruh perempuan PSK yang terdaftar di dalam wisma-wisma mendapatkan pengobatan gratis dari Puskesmas Putat Jaya setiap Hari Kamis. Hal ini dilakukan untuk mengecek apabila ditemukan perempuan PSK yang tertular penyakit kelamin atau bahkan HIV/AIDS. Selain itu juga dilakukan pemberian alat pengaman ketika berhubungan dengan pelanggan. Karena Dinas Kesehatan tidak bisa menjamin kesehatan setiap pelanggan yang masuk ke wisma-wisma, maka yang bisa dilakukan pencegahannya adalah dengan memberikan tindakan pencegahan dan monitoring terhadap para perempuan PSK.

Logika sederhana mengenai nilai kesehatan di dalam Lokalisasi Dolly-Jarak adalah apabila lokalisasi tersebut masih ada, tentu penyebaran dan penularan penyakit kelamin dan HIV/AIDS bisa dideteksi dan diketahui lebih dini oleh pihak Puskesmas Putat Jaya yang melakukan pemeriksaan rutin. Namun apabila lokalisasi ditutup, maka tidak ada jaminan mengenai penyebaran penyakit kelamin dan HIV/AIDS yang tidak bisa dideteksi oleh petugas kesehatan. Hal ini yang menjadi salah satu masalah yang ditimbulkan dari adanya penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak.

Dimensi nilai Hak Asasi Manusia dan keadilan berkaitan dengan maraknya kasus *human trafficking* yang sering terjadi dalam prostitusi. Perempuan seringkali menjadi korban perdagangan manusia untuk dijerumuskan ke prostitusi. Dua informan peneliti mengaku bahwa latar belakang mereka berasal dari desa dan dijanjikan mendapatkan pekerjaan mudah di Surabaya. Ternyata sesampainya di Surabaya mereka dititipkan kepada mucikari dan bekerja di Lokalisasi Dolly-

Jarak. Karena belum mengenal Surabaya dan tidak memiliki penghasilan, mereka terpaksa untuk mengikuti mucikari dan menjadi PSK di lokalisasi.

Dimensi nilai Gender berkaitan dengan ketidakadilan gender yang sering terjadi dalam dunia prostitusi. Salah satu contoh dari ketidakadilan gender adalah gender dan kekerasan. Gender dan kekerasan yang berarti bahwa kekerasan (*violence*) merupakan serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Penyebab utamanya adalah ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat masih tumbuh dengan sistem patriarki yang melihat bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Begitu pula dengan pengaturan struktural yang lebih cenderung berpihak pada laki-laki daripada perempuan. Sehingga kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut dengan *gender-related violence*.

Gender-related violence merupakan kekerasan dalam bentuk pelacuran atau prostitusi yang disebabkan oleh penyelenggaraan suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Penyebab adanya kekerasan gender adalah negara yang masih cenderung berpihak kepada laki-laki. Dalam studi penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak yang kerap kali mendapatkan perlakuan negatif dari masyarakat adalah para perempuan PSK, seolah-olah yang menyebabkan degradasi moral pada lingkungan sekitar adalah perempuan PSK. Tidak pernah disentuh sedikitpun mengenai permasalahan permintaan *user* atau pelanggan laki-laki akan kebutuhan perempuan PSK di Kota Surabaya oleh Pemkot Surabaya.

Masyarakat dan negara kerap kali menggunakan standar ganda kepada para perempuan PSK tersebut. Di satu sisi pemerintah melarang dan menangkap

para pekerja seksual, disisi lain pemerintah menarik pajak dari mereka. Larangan tersebut diwujudkan dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak dan sekian pasal yang dijertakan apabila masih melakukan kegiatan prostitusi. Berdasarkan paparan dari informan penelitian, bahwa perempuan PSK tidak hanya berada di lokalisasi, namun juga di tempat-tempat yang berijin formal seperti tempat karaoke dan panti pijat. Bagian ini yang kurang disentuh oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Standar ganda yang dikenakan kepada perempuan PSK memang terjadi. Di satu sisi Pemerintah Kota Surabaya melarang beroperasinya perempuan PSK di lokalisasi, di sisi lain Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan pajak dari tempat hiburan yang masih beroperasi. Kemungkinan ini juga bisa terjadi sebelum penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Hal lainnya adalah seorang perempuan PSK dianggap rendah oleh masyarakat namun lokalisasi selalu ramai dikunjungi oleh tamu dan pelanggan.

Pelacuran atau prostitusi yang disebabkan oleh penyelenggaraan suatu mekanisme ekonomi juga mengakibatkan eksploitasi terhadap tubuh perempuan PSK. Negara mengeksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti pemasukan berupa pajak yang diterima dari pengelolaan tempat lokalisasi dan tempat hiburan. Kebanyakan perempuan PSK yang mengalami *gender-related violence* tidak menyadari bahwa tubuhnya sedang dieksploitasi oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah penetapan standar ganda yang dikenakan kepada para perempuan tadi. Oleh karena itu dibutuhkan pemetaan berbagai kepentingan atas tubuh perempuan PSK seperti yang dilakukan di atas.

Berkaitan tentang eksploitasi tubuh perempuan, bisa dikatakan bahwa ada sebuah keadaan perempuan tidak bisa bebas akan tubuhnya sendiri. Perempuan selalu dijadikan kepentingan oleh pihak-pihak di luar tubuhnya. Baik itu dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, lembaga negara, dan kepentingan kelompok tertentu. Beauvoir berpendapat bahwa perempuan selalu dikonstruksikan oleh laki-laki melalui struktur dan lembaga laki-laki. Padahal pada dasarnya perempuan sama dengan laki-laki.

Perempuan PSK selalu didefinisikan oleh pihak lain berdasarkan kepentingannya. Begitupun negara dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya yang masih mengkonstruksikan diri sebagai struktur lembaga laki-laki. Perempuan PSK dijadikan ajang arena perebutan kepentingan pihak yang setuju dan yang tidak setuju atas penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Perempuan PSK dipaksa untuk menerima keadaan dirinya oleh lingkungan sekitar.

Perempuan PSK tidak diberikan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus didefinisikan oleh laki-laki. Sehingga yang menentukan keberadaan atau eksistensi perempuan PSK adalah laki-laki dan pihak yang menjadikan perempuan PSK sebagai perebutan kepentingan. Perempuan PSK harusnya bisa menjadi subyek, tidak hanya menjadi obyek dari arena kepentingan tersebut. Kekuatan pembebasan akan tubuh perempuan PSK sendiri bisa muncul karena adanya kesadaran akan otonomi tubuhnya.

Negara dalam artian lebih sempit adalah Pemerintah Kota Surabaya belum mampu mengakomodir kebutuhan akan perempuan PSK itu sendiri. Negara belum pernah mengajak perempuan PSK untuk berbicara dan menemukan *win-win*

solution sehingga aspek ini yang harus dikritisi lebih jauh. Sikap dan proses yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya juga belum memberikan kenyamanan pada perempuan PSK seperti yang sudah dijelaskan pada analisis awal. Sehingga penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak bukan hanya sekedar kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menekan angka prostitusi dan mengalihprofesikan perempuan PSK, melainkan tubuh perempuan PSK juga digunakan sebagai arena perebutan kepentingan.

